

**DETERMINAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA  
SERIKAT DALAM MERESPONS AGRESI MILITER RUSIA TERHADAP  
UKRAINA TAHUN 2022-2024**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**TALITHA NABILAH**

21323007

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**DETERMINAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA  
SERIKAT DALAM MERESPONS AGRESI MILITER RUSIA TERHADAP  
UKRAINA TAHUN 2022-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**TALITHA NABILAH**

21323007

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Determinan Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat dalam  
Merespons Agresi Militer Rusia terhadap Ukraina Tahun 2022-2024**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal  
18 Juli 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Mohammad Rezky Utama, S.I.P., M.Si
- 3 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.

Tanda Tangan

*Karina*  
*Mohammad Rezky Utama*  
*Hangga Fathana*



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini Talitha Nabilah menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 18 Juli 2025



Talitha Nabilah

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara.....	16
1.8 Metode Penelitian.....	18
1.8.1 Jenis Penelitian.....	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	19

1.8.4 <i>Proses Penelitian</i> .....	19
1.9 Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB 2 POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONFLIK RUSIA-UKRAINA 2022-2024</b> .....	<b>22</b>
2.1. Influencer .....	22
2.2.1 <i>Bureaucratic influencers</i> .....	22
2.2.2 <i>Partisan Influencers</i> .....	29
2.2.3 <i>Interest Influencers</i> .....	35
2.2.4 <i>Mass Influencers</i> .....	38
2.2 Pengambil Keputusan.....	47
<b>BAB 3 EKONOMI MILITER DAN KONTEKS INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT DALAM KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA KONFLIK RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022-2024</b> .....	<b>49</b>
3.1. Kondisi Ekonomi dan Militer .....	49
3.1.1 <i>Dimensi Kemampuan Ekonomi</i> .....	49
3.1.2 <i>Dimensi Kemampuan Militer</i> .....	55
3.2 Konteks Internasional.....	67
3.1.1 Aspek Geografis .....	68
3.2.2 <i>Aspek Ekonomi</i> .....	72
3.2.3 Aspek Politis .....	77
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>83</b>
4.1. Kesimpulan .....	83
4.2 Rekomendasi.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dukungan Luas di Kedua Partai Bagi AS untuk Bekerja Sama dengan Sekutu dalam Krisis Ukraina.....	41
Tabel 1. 2 Pendukung Partai Republik Lebih Cenderung Mengatakan AS Tidak Memberikan Dukungan yang Cukup kepada Ukraina Dibandingkan Pendukung Partai Demokrat.....	43

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. 1 Pendapat Masyarakat Amerika Serikat terhadap Dukungan US ke Ukraina.....	39
Diagram 1. 2 Pendapat Warga AS terkait Dukungan Pemerintah AS terhadap Ukraina.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri	..... 12
Gambar 4. 1 Hasil Analisis 4 Determinan Politik Luar Negeri.....	83

## DAFTAR SINGKATAN

AS	<i>Amerika Serikat</i>
BI	<i>Bureaucratic Influencers</i>
CIA	<i>Central Intelligence Agency</i>
GAO	<i>Government Accountability Office</i>
NSA	<i>National Security Agency</i>
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
UCCA	<i>Ukrainian Congress Committee of America</i>
UE	<i>Uni Eropa</i>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam merespons agresi militer Rusia terhadap Ukraina pada periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka serta teori determinan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin. Dalam teori ini, keputusan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi politik domestik, peran aktor birokrasi (bureaucratic influencers), partai politik (partisan influencers), kelompok kepentingan (interest influencers), opini publik (mass influencers), serta kemampuan ekonomi, militer, dan situasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat memberikan respons yang kuat melalui bantuan militer, ekonomi, dan diplomatik kepada Ukraina. Hal ini didorong oleh komitmen strategis untuk menjaga stabilitas kawasan Eropa, membendung ekspansi Rusia, serta mempertahankan tatanan dunia berbasis demokrasi dan hukum internasional. Namun, dinamika domestik seperti perbedaan pandangan antara Partai Demokrat dan Republik menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan politik internal. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan nasional dan tekanan dari berbagai aktor domestik maupun internasional.

**Kata-kata kunci:** Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat, Rusia, Ukraina

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze the process of making US foreign policy in response to Russian military aggression against Ukraine in the period 2022–2024. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach and the theory of foreign policy determinants by William D. Coplin. In this theory, policy decisions are influenced by various factors, including domestic political conditions, the role of bureaucratic actors (bureaucratic influencers), political parties (partisan influencers), interest groups (interest influencers), public opinion (mass influencers), as well as economic, military capabilities, and the international situation. The results of the study show that the United States responded strongly through military, economic, and diplomatic assistance to Ukraine. This was driven by a strategic commitment to maintaining the stability of the European region, stemming Russian expansion, and maintaining a world order based on democracy and international law. However, domestic dynamics such as differences of opinion between the Democratic and Republican Parties show that this policy-making is inseparable from internal political challenges. This study emphasizes that US foreign policy is the result of a complex interaction between national interests and pressures from various domestic and international actors.

**Keywords:** Foreign policy, United States, Russia, Ukraine

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konflik adalah situasi di mana terjadi ketegangan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atau tujuan yang saling bertentangan (Handayani, 2023). Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik antar individu, kelompok, negara, hingga konflik berskala global. Penyebab konflik dapat bervariasi, termasuk perbedaan nilai, kepentingan ekonomi, politik, agama, atau sumber daya. Konflik seringkali melibatkan ketegangan emosional, perbedaan pendapat, dan seringkali berujung pada pertikaian fisik atau nonfisik. Penyelesaian konflik dapat melalui berbagai cara, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga intervensi pihak ketiga. Memahami sifat, akar penyebab, dan dinamika konflik sangat penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan mencegah eskalasi konflik yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Konflik Rusia-Ukraina adalah konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada tahun 2014. Konflik ini dipicu oleh aneksasi Krimea oleh Rusia dan protes di Ukraina yang mengarah pada pergantian kekuasaan di negara tersebut. Konflik ini melibatkan pertempuran di wilayah timur Ukraina, terutama di wilayah Donbas, antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia. Konflik ini telah menimbulkan kerugian besar dalam hal korban jiwa, pengungsi, dan kerusakan infrastruktur (Najmi & Lestyaningsih 2021, 1).

Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, negara yang pertama kali di invasi Rusia pada tahun 2014 dan sebagian telah didudukinya selama satu dekade. Perang tersebut telah menyebabkan ratusan ribu orang tewas atau terluka, menurut laporan A.S dan perkiraan lainnya, serta pengungsian lebih dari 9 juta orang pada Mei 2024, menurut organisasi kemanusiaan internasional. Pada tahun 2024, Rusia telah melakukan berbagai serangan, merebut beberapa kota dan pemukiman tambahan di Ukraina. Ukraina terus melakukan operasi defensif, didukung oleh bantuan militer terutama dari Amerika Serikat dan Eropa (Tourangbam, 2024).

Para pemimpin Amerika Serikat, *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), Uni Eropa (UE), dan mitra lainnya menyebut perang melawan Ukraina tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Amerika Serikat, melalui koordinasi dengan UE, NATO, dan negara-negara lain, telah memberikan bantuan besar kepada Ukraina, memberlakukan serangkaian sanksi yang semakin berat terhadap Rusia dan pendukungnya, serta berupaya meningkatkan akuntabilitas atas kejahatan perang yang dilakukan Rusia. Untuk mencegah agresi lebih lanjut, Amerika Serikat dan NATO telah membentrok tingkatan kehadiran militer mereka di Eropa Tengah dan Timur (Ercan & Gülboy 2023, 8-9). Di Amerika Serikat, para pembuat kebijakan dan pengamat terus mempertimbangkan dampak bantuan terhadap Ukraina, efektivitas sanksi, jalannya konflik, dan dampak perang yang berkepanjangan. Kongres dapat mempertimbangkan tindakan dan pengawasan tambahan sehubungan dengan hal ini dan isu-isu terkait (Hendra 2021, 6-7).

Sejak Tahun Anggaran 2022, Kongres telah memberlakukan lima langkah alokasi tambahan yang memberikan bantuan kepada Ukraina dan negara-negara

lain yang terkena dampak perang, serta pendanaan terkait. Dari total \$174,2 miliar alokasi darurat yang disediakan oleh undang-undang ini, termasuk \$60,8 miliar dalam alokasi tambahan tahun fiskal 2024, Kongres telah mengalokasikan sekitar \$127,6 miliar untuk bantuan kepada Ukraina dan negara-negara lain yang terkena dampak perang. Dari jumlah tersebut, sekitar \$77,4 miliar telah digunakan untuk bantuan keamanan (termasuk untuk menggantikan perlengkapan pertahanan AS yang diberikan kepada Ukraina), \$40,3 miliar untuk bantuan ekonomi, dan \$9,8 miliar untuk bantuan kemanusiaan. Kongres mengalokasikan \$44,6 miliar lagi untuk mendukung operasi militer AS di Eropa dan respons pemerintah AS lainnya terhadap perang, termasuk untuk penerapan sanksi dan bantuan bagi pengungsi dan pendatang (sekitar \$2,1 miliar telah dialokasikan untuk tujuan bantuan global lainnya) (Gheciu & von Hlatky 2024, 10-11).

Khusus untuk Ukraina, Pemerintahan Biden hingga saat ini telah memberikan bantuan keamanan sebesar lebih dari \$51 miliar, bantuan keuangan langsung sebesar \$22,9 miliar dengan tambahan \$7,85 miliar yang diantisipasi pada tahun anggaran 2024 dan bantuan non-kemanusiaan sebesar \$2,3 miliar sejak Februari 2022. Pemerintah juga telah memberikan bantuan tersebut dan memperkirakan sekitar \$5 miliar akan digunakan antara lain untuk sektor energi, pemerintahan, dan pertanian Ukraina, serta untuk mendukung kebutuhan pengungsi Ukraina di negara lain (Nestoras 2022, 7-8).

Pada April 2024, negara-negara Eropa dan lembaga-lembaga UE telah menyediakan lebih dari \$100 miliar bantuan untuk Ukraina sejak Februari 2022, termasuk lebih dari \$45 miliar bantuan keamanan. Pada bulan Februari 2024, para pemimpin UE menyetujui tambahan bantuan sebesar \$54 miliar untuk Ukraina,

yang akan dicairkan hingga tahun 2027 (Nestoras 2021, 16). UE telah mengalokasikan tambahan \$18 miliar untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Ukraina di Eropa; masing-masing anggota UE juga telah memberikan bantuan pengungsi. Jepang, Kanada, negara-negara lain, dan organisasi internasional juga telah memberikan bantuan kepada Ukraina.

Pada bulan Februari 2023, Pemerintahan Biden menetapkan bahwa anggota pasukan Rusia dan pejabat Rusia lainnya telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina. Pihak berwenang Ukraina dan pihak lain menuduh pasukan Rusia melakukan pembunuhan massal dan tanpa pandang bulu, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya, serta penargetan yang disengaja terhadap warga sipil, dan “penyaringan” paksa (interogasi dan pemisahan) terhadap warga sipil dan non-pejuang termasuk anak-anak dari wilayah pendudukan Rusia di Ukraina. Pada bulan Mei 2024, Departemen Luar Negeri membuat keputusan bahwa Rusia telah menggunakan senjata kimia kloropikrin terhadap pasukan Ukraina dan melanggar Konvensi Senjata Kimia (Mina 2024, 28).

Perang di Ukraina adalah tragedi yang tidak dapat dihindari akibat ketidakmampuan Presiden Biden sebagai pemimpin dunia dan kebijakan luar negerinya yang kacau (Tourangbam 2024, 2). Perang ini telah memecah belah warga Amerika dan gerakan konservatif mengenai keterlibatan Amerika dalam konflik ini dan bagaimana Perang Ukraina mempengaruhi stabilitas Eropa dan global. Perang Ukraina adalah pertanyaan kebijakan luar negeri yang sangat kompleks bagi Amerika Serikat (Wijayanti & Machmudi 2022, 193).

Para pendukung dukungan agresif AS, termasuk beberapa yang menyerukan keterlibatan langsung militer AS, memandang perang tersebut sebagai ancaman signifikan terhadap keamanan Amerika, Eropa, dan internasional. Mereka mengklaim bahwa tanpa bantuan militer Amerika yang kuat dan tidak terbatas ke Ukraina, Rusia akan bergerak setelah menaklukkan Ukraina untuk membangun kembali bekas Uni Soviet dan menyerang negara-negara lain, termasuk anggota NATO. Beberapa dari pendukung ini mengklaim bahwa kemenangan Rusia di Ukraina akan melemahkan demokrasi dan keamanan di wilayah lain di dunia dan dapat mendorong Tiongkok untuk menyerang Taiwan. Mereka yang menganut pandangan ini, terutama Presiden Biden, telah mengkritik keras siapa pun yang menentang atau bahkan menyatakan skeptis terhadap bantuan militer Amerika ke Ukraina sebagai orang yang pro-Rusia, pro-Putin, anti-demokrasi, dan isolasionis.

Meskipun beberapa pengkritik AS terhadap bantuan militer kepada pemerintahan Volodymyr Zelensky mungkin memang isolasionis, sebagian besar adalah warga Amerika yang khawatir mengenai apakah kepentingan strategis vital Amerika dipertaruhkan dalam Perang Ukraina, potensi keterlibatan pasukan militer AS, dan apakah Amerika terlibat dalam hal ini. Dalam perang proksi dengan Rusia yang dapat meningkat menjadi konflik nuklir (Gheciu & von Hlatky 2024, 7-8). Mereka juga melihat perlunya membuat rencana untuk mengakhiri perang ini dan tidak sekadar menyediakan senjata untuk konflik yang tampaknya akan menemui jalan buntu jangka panjang.

Persyaratan utama bagi pendekatan *America First* terhadap keamanan nasional AS adalah pertama-tama, seorang panglima tertinggi yang kompeten dan tegas seorang presiden yang menjalankan kepemimpinan yang kuat di panggung

dunia, menunjuk pejabat keamanan nasional yang patut dicontoh, dan menerapkan kebijakan luar negeri yang koheren dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. melindungi Amerika dari ancaman asing dan mempromosikan kepentingannya di luar negeri (Bramastya & Puspitarini 2022, 5-6).

Pendekatan *America First* juga memerlukan militer yang kuat, penggunaan kekuatan militer AS secara bijaksana, dan menjaga pasukan AS dari perang yang tidak perlu dan tidak berkesudahan (Ercan & Gulboy 2023, 7-8). Hal ini berarti bekerja dalam aliansi dan dengan mitra untuk meningkatkan keamanan regional dan pada saat yang sama mengharuskan anggota aliansi dan sekutu untuk memberikan kontribusi penuh dalam mempertahankan keamanan di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kebijakan Amerika Serikat dalam merespon agresi militer Rusia terhadap Ukraina pada periode tahun 2022-2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana determinan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam merespons agresi militer Rusia terhadap Ukraina tahun 2022-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat dalam merespons agresi militer Perang Rusia ke Ukraina Tahun 2022-2024.

2. Untuk mengetahui proses dinamika pengambilan kebijakan Amerika Serikat terhadap Perang Rusia ke Ukraina Tahun 2022-2024.

#### **1.4 Cakupan Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah analisis mendalam tentang adanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik tersebut, termasuk sikap politik, strategi diplomasi, dan dukungan yang diberikan kepada Ukraina 2022-2024. Penelitian juga akan memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat berinteraksi dengan pihak lain, seperti sekutu dan organisasi internasional, dalam upaya mereka untuk menangani konflik. Penelitian akan mempelajari kebijakan Amerika Serikat adalah dengan melihat kasus mengenai awal mula Amerika Serikat memulai bantuan militer kepada Ukraina sekitar 24 Februari 2022 adalah terjadinya Rusia meluncurkan “Operasi militer khusus” ke Ukraina dan pengumuman adanya aneksasi empat wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia yang terjadi di Ukraina. Sedangkan di tahun 2023 adalah terjadinya pertempuran perang berlanjut intensif di front timur dan selatan tentang perekonomian yang sangat melonjak tinggi, serta di tahun 2024 adalah adanya konflik memasuki tahun ketiga Ukraina mempertahankan pertahanan udara dan Rusia lanjutkan serangan rudal melalui drone pada tahun tersebut.

Dalam penelitian ini, aspek ekonomi yang digunakan sebagai bagian dari kerangka analisis dibatasi secara spesifik agar pembahasan tidak melebar ke ranah yang kurang relevan dengan fokus studi. Mengingat cakupan ekonomi yang sangat luas, maka dimensi ekonomi dibatasi pada dua subdimensi utama yang dianggap paling strategis dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat

terhadap konflik Rusia-Ukraina, yaitu kapasitas produksi dan industri pertahanan serta peran ekonomi internasional.

Pertama, kapasitas produksi dan industri pertahanan merujuk pada kemampuan Amerika Serikat dalam memproduksi sistem persenjataan, logistik militer, dan teknologi pertahanan yang menjadi fondasi utama bagi bantuan militer ke Ukraina. Fokus ini juga mencakup kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang merefleksikan kekuatan ekonomi domestik Amerika dalam mendukung operasi luar negerinya. Dengan kata lain, sektor industri pertahanan tidak hanya merepresentasikan kekuatan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung diplomasi militer dan pengaruh geopolitik Amerika di kawasan Eropa Timur.

Kedua, peran ekonomi internasional mencakup posisi Amerika Serikat dalam sistem perdagangan dan keuangan global. Penelitian ini menyoroti bagaimana AS menggunakan instrumen ekonomi, seperti sanksi terhadap Rusia, pembekuan aset milik pemerintah dan individu Rusia, serta pemanfaatan dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global sebagai alat tekanan geopolitik. Melalui pendekatan ini, terlihat bagaimana kebijakan ekonomi dapat menjadi bagian integral dari strategi politik luar negeri. Pembahasan tidak akan mencakup isu-isu ekonomi domestik lain seperti tingkat pengangguran, inflasi, atau subsidi energi, kecuali jika isu-isu tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap Ukraina.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Saat ini, sudah menjadi isu atau fenomena yang cukup menarik perhatian begitupun juga dengan organisasi yang menaungi bahwa negara yang menerapkannya dapat dianggap tidak bertanggung jawab atau tidak berperan aktif dalam menyelesaikan konflik. Maka dari itu, terdapat penelitian yang menjelaskan tentang kebijakan yang dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang diinginkan, terutama jika pihak yang menerima tanggung jawab tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi konflik dengan efektif bagi penulis untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, adapun beberapa jurnal yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan membuktikan bahwa setiap penelitian memiliki sudut pandang yang berbeda.

Jurnal pertama yang berjudul “*Nuclear Overtones in the Russia Ukraine War*” oleh Manpreet Sethi. Jurnal tersebut membahas masalah nuklir dalam konflik Rusia-Ukraina. Dimana konflik Rusia-Ukraina telah menarik perhatian senjata pemusnah massal dan kemungkinan penggunaannya. Terutama dengan cara penggunaan Rusia dalam konflik yang menghadapi kekuatan non-nuklir, Ukraina. Dalam penelitiannya juga menekankan pada pandangan bahwa Rusia memanfaatkan kekebalan imunitas dari statusnya sebagai negara dengan kekuatan nuklir untuk melakukan invasi di Ukraina. Ancaman potensi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia merupakan cara untuk menghalangi Ukraina untuk meminta dan menerima dukungan dari negara-negara lain. Dalam konflik Rusia-Ukraina, strategi *deterrence* yang memanfaatkan senjata nuklir ini telah mendorong kedua pihak melakukan moderasi terkait tindakan militer masing-masing. Selain itu, strategi ini

juga menyebabkan Amerika Serikat untuk ikut menjaga eskalasi agar tetap terkendali dengan membatalkan uji coba rudal balistik darat yang telah dijadwalkan dan menolak untuk meningkatkan tingkat kesiagaan pasukan nuklirnya. Tujuan dari upaya Amerika Serikat adalah menghindari tindakan yang dapat disalah artikan atau dilihat sebagai provokasi oleh Rusia (Sethi 2022 , 8).

Jurnal kedua yang berjudul “*Exploring the effectiveness of Nuclear Deterrence: A Comparative Analysis of the Korean War, Cuban Missile crisis, and Russia - Ukraine Conflict through the Lens of Rational Nuclear Deterrence, the Nuclear Taboo, Self-Deterrence, and Atomic anxiety Theories*”. Holland membahas mengenai keefektifitasan penangkalan nuklir dengan penelitian ini menjelaskan mengenai adanya strategi nuklir yang dimiliki Rusia dan NATO dan strategi *deterrence* Rusia berhasil untuk mencegah adanya pihak barat yang rasional dengan memutuskan untuk tidak terlibat secara langsung agar tidak mengalami perang nuklir. Namun, Kebijakan ini menjadikan ketidakberhasilan menghentikan Ukraina untuk menduduki wilayah oleh Rusia (Holland 2021, 5).

Jurnal yang ketiga yang berjudul Ali Ercan dan Burak Gullboy dengan judul “*Nuclear Deterrence and A Prospective Assessment of the Russian-Ukrainian War*”. Dengan menggunakan kerangka konseptual senjata dan kekuatan nuklir, strategi nuklir, dan *nuclear deterrence*, penelitian ini menjadikan pembahasan *nuclear deterrence* yang menjadikan masa lalu hingga masa sekarang dan konflik Rusia-Ukraina. Dimulai dengan analisis sejarah penggunaan *nuclear deterrence* pada Perang Dingin hingga pada akhir tahun 2000 disebabkan oleh adanya elemen penangkalan (*deterrence*) dalam lingkup pengaruh (*spheres of influence*). Kemudian, penulis juga melakukan penilaian prospektif terhadap perang Rusia-

Ukraina yang melihat Rusia sebagai negara kekuatan nuklir yang memiliki masalah keamanan yaitu ancaman negara-negara barat melalui NATO dan Uni Eropa di dekat perbatasan. Dalam penilaiannya, membahas kemungkinan penggunaan senjata nuklir dan berbagai tanggapan dari pihak terkait seperti NATO dan Uni Eropa (Ercan & Gülboy, 2023).

Penelitian yang telah dilakukan dan menggunakan strategi *deterrence* hingga saat ini belum ada yang menjadikan adanya *variable deterrence requirements* dan peneliti menjadikan adanya suatu inovasi mengenai dinamika yang diambil Amerika Serikat untuk menghadapi Perang Rusia ke Ukraina. Selain itu, penelitian yang sudah ada memberikan celah bagi penelitian yang akan dilakukan penulis karena belum ada yang membahas mengenai kebijakan yang dilakukan pada konflik tersebut menggunakan sudut pandang Rusia. Mulai dari tahun 2022 hingga akhir tahun 2024, konflik yang masih berlangsung dan semakin intens untuk menjadikan isu menarik untuk dibahas.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

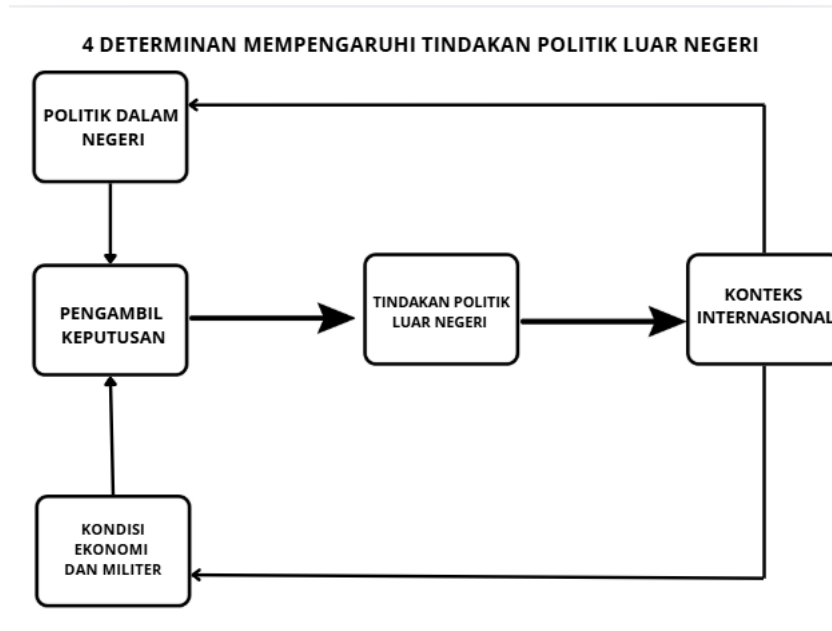
Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan penulis menggunakan konsep determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin (Coplin, 2003). Menurut penulis teori ini cocok untuk menganalisis “Bagaimana determinan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam merespons agresi militer Rusia terhadap Ukraina tahun 2022-2024?”

Mengenai kebijakan yang berupaya melalui untuk menjalin hubungan dengan negara lain untuk sebagai perisai adanya konflik dengan konfrontasi negara agresor. Proses pengambilan strategi yang dapat diartikan sebagai suatu langkah

yang dapat diambil untuk memilih alternatif yang ada. Menurut William D. Coplin terdapat 4 determinan utama (Coplin 2003, 82).

Adapun proses dalam pengambilan kebijakan suatu negara yang dipaparkan oleh Coplin sebagaimana yang digambarkan melalui **Gambar 1**.

**Gambar 1. 1 Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri**



**Sumber: Coplin (2003, 30)**

Yang pertama adalah *kondisi politik dalam negeri*, kondisi politik dalam suatu negara yang bisa mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri yang dibuat akan diberlakukan oleh negara. Kondisi dengan adanya politik yang kita maksud adalah berupa penolakan atau dukungan dalam pelaksanaan kebijakan dengan mempengaruhi dalam membuat suatu keputusan untuk mengambil adanya kebijakan luar negeri. Faktor-faktor tersebut di antaranya seperti stabilitas negara, kepribadian pengambilan adanya keputusan atau adat masyarakat dalam suatu negara. Lebih lanjut dalam bukunya William D. Coplin menjelaskan terdapat

*Policy influencers* yaitu aktor yang mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Terdapat 4 kategori *Policy influencers*:

- a. *Bureaucratic influencers* (birokrat yang mempengaruhi) yaitu dengan berupa individu atau organisasi yang menjadikan hadirnya pemerintahan dengan membuat keputusan dalam mempertimbangkan dan mengambil sebuah kebijakan luar negeri. *Policy influencers* ini dengan memberikan informasi secara langsung dengan para pembuat kebijakan untuk menjadikan sebuah kebijakan sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang telah diputuskan.
- b. *Partisan influencers* (Partai yang mempengaruhi), partai politik yang berada di lembaga legislatif yang berperan menjembatani keinginan publik dan kebijakan eksekutif serta dapat berperan sebagai pendukung ataupun penentang kebijakan pemerintah negara. Mereka membuat Amerika Serikat dengan mengambil kebijakan sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat.
- c. *Interest influencers*, sering dikenal sebagai kelompok lobi atau organisasi informal yang mewakili kepentingan tertentu yang berupaya mendorong negara untuk menerapkan atau menolak satu kebijakan yang sesuai dengan preferensi mereka. Mereka yang memiliki beberapa metode yang digunakan dalam mempengaruhi adanya para pembuat strategi seperti melakukan penyelesaian konflik yang aman dan berkelanjutan sambil menjaga hubungan diplomatik yang penting bagi stabilitas regional.
- d. *Mass influencers*, *Policy influencers* ini memiliki tipe yang terwujud melalui adanya opini publik yang tertuang pada sebuah media massa. Opini

yang diberikan oleh *mass influencers* biasanya dapat dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kebijakan dalam pembuatan strategi untuk merasionalisasikan suatu strategi yang dapat menghindari eskalasi keberlangsungan konflik yang ada dan dapat berpotensi sangat merugikan;

Yang kedua, ada *interaksi bidang isu*, kemampuan ekonomi dan kemampuan militer yang dimiliki oleh suatu negara yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri tersebut. Faktor ekonomi suatu negara bisa menjadi sebuah tolak ukur dalam kemampuan negara tersebut di kancah internasional.

- a. Bidang isu pertama, yaitu keamanan nasional adalah bidang isu, yang sangat penting bagi mayoritas *policy influencers* di berbagai negara. Kecuali bagi *partisan influencers* yang bersifat revolusioner, hampir semua jenis *policy influencers* memperhatikan persoalan keselamatan negara. Dalam sistem politik terbuka, perhatian terhadap isu ini sangat besar, bahkan *partisan influencers* yang biasanya menjadi oposisi atau yang berpandangan revolusioner pun sering kali bersedia bekerja sama dalam persoalan keamanan nasional, khususnya ketika mereka merasa ada ancaman dari negara lain terhadap negaranya.
- b. Bidang isu kedua yang penting bagi *policy influencers* adalah hubungan ekonomi luar negeri. Di sinilah perbedaan muncul antara pendekatan nasionalis dan partikularis. Konflik sering timbul antara kelompok *influencers* yang mendukung perdagangan bebas secara luas dan kelompok lain yang mendorong kebijakan ekonomi protektif seperti tarif untuk melindungi pekerja domestik dari persaingan luar negeri. Meskipun kedua

jenis *influencers* ini kerap menggunakan argumen nasionalistik, mereka tetap dapat dibedakan.

- c. Kategori isu ketiga, menyangkut kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan keamanan maupun ekonomi, melainkan lebih kepada kombinasi kondisi internasional tertentu dan predisposisi ideologis, seperti perbedaan sejarah dan latar belakang politik suatu negara. Isu-isu ini mencakup perbatasan wilayah, kebijakan persahabatan, hingga sentimen nasionalistik terhadap negara lain.
- d. Bidang isu terakhir, adalah yang menyangkut cara pencapaian tujuan politik luar negeri alih-alih sifat tujuan spesifik. Misalnya, tuntutan terhadap politik luar negeri yang bersifat damai, atau sebaliknya lebih agresif, bukanlah tentang substansi kebijakan, melainkan menyorot pada cara dalam pencapaian tujuan tersebut, seperti penggunaan alat-alat tertentu.

Selain itu, adanya faktor militer yang juga berperan penting dalam pengambilan keputusan strategi. Semakin besar anggaran ekonomi yang dianggarkan untuk militer suatu negara akan sangat berpengaruh besar dengan kemampuan negara dalam mempertimbangkan pertahanan serta keamanan negara (Coplin 2003, 97).

Yang ketiga, *situasi ekonomi dan kondisi internasional*, sifat adanya sistem internasional dalam suatu keterkaitan antar negara menjadikan adanya kondisi yang ada akan mempengaruhi hubungan suatu negara serta bagaimana negara dalam melakukan sebuah strategi. Dalam lingkup internasional setiap negara memiliki wilayah yang dikuasai dalam artian tidak dapat diganggu dan pastinya akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang dibuat.

## **1.7 Argumen Sementara**

Untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana determinan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam merespons agresi militer Rusia terhadap Ukraina tahun 2022–2024?”, penulis mengemukakan bahwa terdapat lima determinan utama yang saling berkaitan dan membentuk arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik tersebut, yaitu: politik dalam negeri, pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, tindakan politik luar negeri, dan konteks internasional. Berikut penjabaran argumen sementara untuk masing-masing determinan tersebut:

### **1. Politik Dalam Negeri**

Dinamika politik domestik Amerika Serikat sangat memengaruhi arah kebijakan luar negeri terhadap Ukraina. Terjadi polarisasi tajam di Kongres antara Partai Demokrat yang mendukung bantuan militer ke Ukraina dan Partai Republik yang lebih kritis, terutama terhadap besarnya anggaran yang digunakan serta efektivitas kebijakan tersebut. Faktor-faktor seperti tekanan dari konstituen, sikap media, dan popularitas presiden juga menjadi katalis dalam mendukung atau menghambat kebijakan luar negeri tertentu. Penolakan atau dukungan dari masyarakat dan partai politik ini membentuk tekanan horizontal terhadap pengambil keputusan.

### **2. Pengambil Keputusan**

Peran Presiden Joe Biden beserta tim keamanan nasionalnya menjadi elemen sentral dalam merumuskan respons terhadap agresi Rusia. Melalui mekanisme eksekutif seperti Presidential Drawdown Authority dan koordinasi

dengan lembaga pertahanan, Presiden mengambil langkah-langkah konkret berupa pengiriman bantuan militer dan diplomasi aktif ke negara-negara mitra. Keputusan politik ini sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap ancaman, agenda politik presiden, dan kalkulasi terhadap dampak domestik dan internasional dari setiap kebijakan yang diambil.

### 3. Kondisi Ekonomi dan Militer

Amerika Serikat memiliki sumber daya ekonomi dan militer yang besar, memungkinkan negara ini untuk menyalurkan lebih dari \$100 miliar bantuan ke Ukraina dalam bentuk senjata, pelatihan militer, dan dukungan logistik. Kemampuan industri pertahanan AS dalam memproduksi sistem senjata canggih seperti HIMARS, Patriot, dan drone taktis menjadi faktor pendorong yang memungkinkan kebijakan ini dijalankan. Besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya retorik, tetapi ditopang oleh kapasitas aktual. Faktor ini menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan strategis dan tingkat keberlanjutan dukungan.

### 4. Tindakan Politik Luar Negeri

Tindakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap konflik Ukraina mencakup bantuan militer langsung, sanksi ekonomi terhadap Rusia, diplomasi aktif di PBB dan NATO, serta penyediaan bantuan kemanusiaan. Kebijakan ini menegaskan posisi AS sebagai pemimpin global dalam mempertahankan norma internasional, serta mencerminkan keberpihakan pada sistem internasional berbasis hukum. Tindakan-tindakan ini juga bersifat multifungsi: mendukung Ukraina secara praktis, menggertak Rusia secara strategis, serta memperkuat solidaritas dengan negara-negara Eropa.

## 5. Konteks Internasional

Kebijakan luar negeri AS dalam kasus Ukraina sangat dipengaruhi oleh struktur sistem internasional. Di satu sisi, AS menghadapi tuntutan dari aliansi seperti NATO dan Uni Eropa untuk menunjukkan kepemimpinan kolektif dalam menjaga stabilitas regional. Di sisi lain, AS juga memperhitungkan bahwa respons terhadap Rusia akan menjadi indikator bagi aktor global lain seperti Tiongkok dalam konteks Taiwan. Selain itu, terdapat logika deterrence yang digunakan AS untuk menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Hal ini menciptakan efek psikopolitik global berupa penguatan persepsi terhadap kekuatan dan komitmen Amerika Serikat.

### **1.8 Metode Penelitian**

#### ***1.8.1 Jenis Penelitian***

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mana untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini akan dilakukan melalui pengumpulan data dengan data tersebut akan diolah menjadi sajian deskriptif berupa kalimat dan frasa. Informasi yang ditemukan dari literatur tersebut kemudian akan disintesis dan dianalisis untuk mendukung argumen atau hipotesis dalam penelitian.

#### ***1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian***

Subjek penelitian dalam konteks ini adalah Amerika Serikat dan Objek penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dan dinamika yang diambil oleh Amerika Serikat dalam merespons terhadap hubungan Perang Rusia dan Ukraina tahun 2022-2024.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data studi pustaka adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan pencarian, pemilihan, dan analisis literatur yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan terkait.

### **1.8.4 Proses Penelitian**

Data-data yang diambil melalui sumber literatur yang akan dikaji dan dipahami secara mendalam oleh penulis kemudian memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah terjamin kebenarannya sebagai suatu sumber primer dan penelitian yang disajikan oleh penulis.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam mengetahui dan memahami penelitian ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan penelitian yang dimana di dalam penelitian ini penulis menyusun penelitian ini ke dalam 4 bab. Bab pertama menjelaskan secara umum mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini yang menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara dan metode pengumpulan data. Kemudian isi dari Bab 1-4 dengan memperdalam mengenai:

Bab kedua membahas politik dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS oleh berbagai aktor domestik, termasuk *bureaucratic influencers* (seperti: Antony J. Blinken, Lloyd James Austin, Jake Sullivan, dan Victoria

Nuland), *partisan influencers* (Partai Demokrat dan Partai Republik), *interest influencers* yaitu Organisasi Non-Pemerintah (NGO) seperti *Human Rights Watch*, dan *Ukrainian Congress Committee of America (UCCA)*. Lalu *mass influencers* melalui Media Massa Pew Research. Keempat aktor ini memberikan tekanan dan dukungan yang membentuk arah kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina.

Bab ketiga, Amerika Serikat memiliki kapasitas produksi barang dan jasa serta kekuatan militer yang besar, yang memungkinkan negara ini menyediakan bantuan besar-besaran untuk Ukraina. Selain itu, keterkaitan AS dengan sistem ekonomi global menjadikan konflik Rusia-Ukraina sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi internasional, yang memicu respon aktif dari AS dan Kemampuan militer suatu negara mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah dan kualitas personel militer, kecanggihan teknologi persenjataan, sistem logistik dan mobilisasi, hingga kapasitas pertahanan dan serangan. Negara yang memiliki militer kuat umumnya lebih dihormati dan disegani di tingkat global, karena memiliki kapasitas untuk mempertahankan diri dari ancaman luar maupun untuk memproyeksikan kekuatan ke wilayah lain jika diperlukan.

Bab Keempat, Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam merespons agresi militer Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022–2024 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara empat determinan utama sebagaimana dijelaskan oleh William D. Coplin, yaitu: pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, konteks internasional, serta politik domestik dan aktor-aktor yang mempengaruhinya (*policy influencers*) dan rekomendasi penelitian serupa sebaiknya memasukkan dimensi perbandingan antar negara agar memberikan perspektif komparatif untuk pengembangan akademik

selanjutnya, disarankan agar penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed-method*) agar dapat mengeksplorasi data kuantitatif dari opini.

**BAB 2**

**POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONFLIK**

**RUSIA-UKRAINA 2022-2024**

**2.1. Influencer**

Dalam menganalisis struktur sistem pengaruh kebijakan (*Policy Influencer System*). Kita akan membahas peran politik dalam penyusunan politik dalam negeri dengan membedakan penyusunan politik luar negeri dengan membedakan empat tipe *policy influencers* yaitu:

**2.2.1 Bureaucratic influencers**

Menurut William D.Coplin, *bureaucratic influencers* adalah berbagai individu dan organisasi dalam lembaga eksekutif yang membantu pengambil keputusan dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara rancangan kebijakan di tingkat konseptual dengan implementasi kebijakan di lapangan. Mereka juga memainkan peran penting dalam menyediakan informasi teknis, data administratif, serta pengalaman praktis yang tidak dimiliki oleh para politisi atau pejabat tinggi pembuat keputusan (Coplin 2003, 82).

Coplin menjelaskan bahwa kelompok ini terdiri dari pegawai negeri sipil senior, analis kebijakan, staf ahli, kepala dinas, dan pejabat teknis lainnya yang telah lama berkecimpung dalam sistem birokrasi. Karena keahlian teknis dan pengalaman mereka dalam bidang-bidang tertentu, mereka memiliki otoritas epistemik (otoritas berbasis pengetahuan) yang membuat rekomendasi mereka sering kali diandalkan dan dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan.

Lebih lanjut, birokrat ini tidak hanya bekerja di belakang layar tetapi juga memiliki kemampuan untuk membentuk agenda kebijakan melalui penyusunan *draft* kebijakan, pengaruh terhadap pemilihan alternatif solusi, serta kemampuan untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan secara konkret di lapangan. Mereka memiliki jaringan internal dalam lembaga, memahami prosedur administrasi, serta memiliki akses terhadap data dan sumber daya organisasi yang membuat posisi mereka sangat strategis.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat menganut model presidensial, dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh berbagai lembaga eksekutif seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional (NSC). Dalam kebijakan luar negeri terhadap Ukraina, birokrat di lembaga-lembaga ini berperan penting sebagai BI, sesuai dengan konsep Coplin. Mereka terlibat langsung dalam merumuskan, menyarankan, dan melaksanakan kebijakan bantuan militer, diplomatik, dan ekonomi. Contohnya adalah Antony Blinken (Menteri Luar Negeri AS) dan Lloyd Austin (Menteri Pertahanan AS) yang secara aktif mengoordinasikan strategi dukungan terhadap Ukraina melalui diplomasi dan pengiriman bantuan pertahanan (White House Briefing 2023, 5-6).

Salah satu birokrat yang berpengaruh dalam pemerintahan Joe Biden adalah Antony J. Blinken, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (*Secretary of State*). Blinken memiliki peran sentral dalam diplomasi luar negeri AS dan menjadi tokoh utama dalam membangun aliansi internasional untuk mendukung Ukraina. Ia secara rutin bertemu dengan pemimpin negara-negara NATO dan menyampaikan pernyataan tegas bahwa Amerika Serikat akan terus

mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina (U.S. Department of State 2023).

Selain itu, Lloyd James Austin, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat (*Secretary of Defense*), juga menjadi birokrat kunci dalam pengambilan keputusan terkait bantuan militer kepada Ukraina. Di bawah koordinasi Austin, Amerika Serikat telah mengirimkan berbagai bentuk bantuan militer termasuk sistem pertahanan udara, amunisi, dan kendaraan tempur. Peran Austin menunjukkan bagaimana institusi militer melalui Departemen Pertahanan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS secara langsung dalam konflik Ukraina (Department of Defense 2023).

Di tingkat kebijakan strategis, Jake Sullivan sebagai Penasihat Keamanan Nasional (*National Security Advisor*) juga berperan penting. Ia bertugas memberi masukan langsung kepada Presiden Biden terkait arah kebijakan luar negeri, termasuk strategi keamanan dan sanksi terhadap Rusia. Sullivan dikenal sebagai arsitek utama dari kebijakan sanksi ekonomi dan dukungan multilateral terhadap Ukraina melalui forum-forum internasional (White House 2023).

Tokoh birokrasi penting lainnya adalah Victoria Nuland, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik, yang aktif dalam diplomasi internasional terkait konflik Rusia-Ukraina. Nuland memiliki pengalaman panjang dalam hubungan luar negeri dan memainkan peran kunci dalam merancang strategi diplomatik AS bersama negara-negara Eropa dan NATO (U.S. Department of State 2023, 2).

Dalam konteks kebijakan luar negeri AS terhadap agresi militer Rusia ke Ukraina, para birokrat berpengaruh seperti Antony Blinken, Lloyd Austin, Jake Sullivan, dan Victoria Nuland memiliki posisi yang sangat sentral. Namun

demikian, perbedaan pendekatan dan tarik menarik antar lembaga tetap terjadi, terutama pada fase awal konflik dan selama proses negosiasi strategi bantuan militer.

Antony Blinken, selaku Menteri Luar Negeri, cenderung mendorong respon diplomatik multilateral dan pendekatan berbasis koalisi. Ia memprioritaskan penguatan aliansi dan legitimasi internasional melalui NATO, G7, dan PBB. Sebaliknya, Lloyd Austin sebagai Menteri Pertahanan, lebih menekankan pada pengiriman bantuan militer langsung dan kebutuhan taktis Ukraina di medan perang, termasuk sistem senjata jarak jauh dan pelatihan tempur lanjutan. Hal ini menciptakan perbedaan tempo dan prioritas antara jalur diplomasi dan jalur militer (White House Briefing, 2023).

Perbedaan ini terlihat, misalnya, dalam perdebatan internal awal 2022 tentang pengiriman tank Abrams dan jet tempur F-16. Departemen Pertahanan awalnya lebih berhati-hati karena pertimbangan eskalasi langsung dengan Rusia, sementara pihak Departemen Luar Negeri, didukung oleh Kongres Demokrat progresif dan negara-negara Eropa Timur, menekan agar dukungan senjata berat segera dikirim. Pada akhirnya, Presiden Biden memutuskan dukungan bertahap, mencerminkan kompromi antara sikap hati-hati Austin dan desakan strategis dari Blinken dan Sullivan (GAO, 2024).

Jake Sullivan, sebagai Penasihat Keamanan Nasional, memainkan peran penyeimbang antara dua pendekatan tersebut. Ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang, termasuk stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sullivan sempat menunjukkan kehati-hatian terhadap penggunaan senjata AS untuk menyerang wilayah dalam Rusia, karena dikhawatirkan memicu eskalasi horizontal. Namun

seiring berjalannya waktu dan melihat efektivitas bantuan, posisi NSC ikut mendukung peningkatan kapasitas Ukraina secara bertahap (The Atlantic Council, 2023).

Victoria Nuland dan Wendy Sherman, sebagai diplomat senior di Departemen Luar Negeri, termasuk yang paling vokal dalam menyuarakan dukungan kuat terhadap Ukraina. Mereka aktif dalam membangun opini internasional, serta mendesak peningkatan sanksi terhadap Rusia di berbagai forum diplomatik. Namun di kalangan birokrat juga terdapat kehati-hatian terhadap risiko jangka panjang dari keterlibatan terlalu dalam, termasuk dampaknya terhadap sumber daya pertahanan AS dan ancaman terhadap Taiwan.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika yang wajar dalam proses kebijakan luar negeri negara demokratis. Meski terdapat tarik-menarik antara pendekatan militer, diplomatik, dan strategis, namun keseluruhan sistem birokrasi mampu menghasilkan kebijakan yang bersifat kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan situasi lapangan. Presiden sebagai pengambil keputusan akhir biasanya akan mengakomodasi pandangan dari masing-masing lembaga melalui koordinasi strategis di NSC.

Birokrasi AS tidak bersifat monolitik, melainkan terdiri dari unit-unit fungsional yang memiliki sudut pandang berbeda namun saling melengkapi. Hal ini justru menunjukkan tingkat profesionalisme dan efektivitas kebijakan luar negeri AS, di mana keputusan yang diambil merupakan hasil pemrosesan berlapis atas masukan dari berbagai birokrat ahli, bukan keputusan sepihak yang reaktif. Coplin menempatkan birokrat dalam posisi strategis justru karena mereka bekerja

pada titik temu antara realitas teknis dan kebijakan strategis nasional (Coplin, 2003: 83).

Selain ada Anthony Blinken, Lloyd Austin, Jake Sullivan, dan Victoria Nuland, terdapat beberapa birokrat penting lainnya yang berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Ukraina. Salah satunya adalah Wendy Sherman, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (*Deputy Secretary of State*) hingga pertengahan tahun 2023. Sherman dikenal sebagai negosiator kawakan yang sering terlibat dalam pembahasan strategis dengan sekutu Eropa dan NATO. Mereka, memainkan peran penting dalam penyusunan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan penguatan koordinasi multilateral untuk mendukung Ukraina. Dalam beberapa kesempatan, ia juga menjadi juru bicara kebijakan luar negeri AS di forum internasional, memperkuat pesan bahwa invasi Rusia adalah ancaman terhadap tatanan global berbasis aturan (Sherman 2023, 3).

Birokrasi Amerika Serikat juga menunjukkan kekuatan dalam hal koordinasi lintas lembaga. Dalam kasus Ukraina, koordinasi antara Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, National Security Council, dan lembaga intelijen seperti CIA (*Central Intelligence Agency*) dan NSA (*National Security Agency*) menjadi penting. Intelijen AS memiliki peran awal dalam menginformasikan kepada dunia internasional tentang kemungkinan invasi Rusia, jauh sebelum perang dimulai. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh para diplomat dan pejabat pertahanan untuk memperingatkan sekutu dan membangun aliansi respons cepat.

Salah satu figur penting lainnya adalah Kurt Campbell, Koordinator untuk Urusan Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional (NSC). Meskipun posisinya tidak langsung terkait Eropa, Campbell terlibat dalam menilai dampak global dari konflik Rusia-Ukraina, khususnya terhadap dinamika kekuatan di Asia dan kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Analisis lintas kawasan seperti ini menjadi bagian penting dalam strategi menyeluruh kebijakan luar negeri AS, dan memperlihatkan bagaimana birokrat bekerja dalam kerangka kompleks geopolitik

Selain pengelolaan kebijakan dan koordinasi internal, birokrat juga memiliki tanggung jawab dalam komunikasi strategis internasional. Mereka menyusun narasi yang disampaikan ke media internasional untuk menjaga legitimasi dukungan AS terhadap Ukraina. Ini terlihat dari konferensi pers, laporan kebijakan, briefing terbuka, hingga kampanye diplomatik yang disusun secara sistematis untuk mempengaruhi opini internasional. Dalam hal ini, birokrasi tidak hanya berfungsi administratif, melainkan juga sebagai aktor yang aktif membentuk opini publik global.

Dengan adanya struktur birokrasi yang terorganisasi dan dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengalaman, pemerintah Amerika Serikat memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk merespons dinamika krisis seperti perang Ukraina. Para birokrat ini bekerja tidak hanya atas nama pemerintahan terpilih, tetapi juga atas dasar kepentingan nasional jangka panjang, yang membuat mereka menjadi tulang punggung dalam konsistensi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini memperkuat pandangan Coplin bahwa birokrat merupakan *policy influencers* yang berperan aktif dan strategis dalam pengambilan keputusan negara.

### *2.2.2 Partisan Influencers*

*Partisan influencers* (partai yang mempengaruhi) adalah dipandang sebagai informasi dua arah dan mempengaruhi saluran di antara para pengambil keputusan resmi dan anggota masyarakat serta partai politik yang berada di lembaga legislatif yang berperan menjembatani keinginan publik dan kebijakan eksekutif sebagai pendukung maupun penentang kebijakan pemerintah negara. Mereka membuat Amerika Serikat dengan mengambil kebijakan sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat (Coplin 2003, 82).

Salah satu alasan utama dibalik dukungan Partai Demokrat adalah keyakinan bahwa agresi Rusia merupakan ancaman tidak hanya bagi Ukraina, tetapi juga menjadi tantangan internasional yang berbasis pada hukum. Pandangan Partai Demokrat, invasi Rusia melanggar prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah yang telah menjadi dasar hubungan internasional pasca-Perang Dingin. Oleh karena itu, mereka melihat dukungan terhadap Ukraina sebagai langkah penting untuk mempertahankan norma-norma internasional dan mencegah agresi lebih lanjut dari negara otoriter (Smith 2022, 45).

Dukungan militer yang diberikan oleh Partai Demokrat sejak pemerintahan Biden adalah mengumumkan paket bantuan militer yang diberikan AS kepada Ukraina diperkirakan mencapai lebih dari \$100 miliar selama satu periode dan Partai Demokrat juga memberikan argumen mengenai dukungan ini bukan hanya untuk membantu Ukraina melainkan untuk mempertahankan diri, tetapi juga mengirimkan pesan tegas kepada Rusia bahwa agresi tidak akan dapat ditoleransi (Anderson 2023, 89).

Dalam Kongres Amerika Serikat, terjadi perpecahan pendapat terkait pemberian bantuan militer untuk Ukraina. Salah satu penyebab utamanya adalah penolakan dari sebagian anggota parlemen Partai Republik. Mereka menilai bahwa pemerintah Ukraina belum serius dalam memberantas korupsi. Namun, tuduhan ini telah dibantah oleh pihak Pemerintah Ukraina (Purnawarta 2024).

Selain itu, Partai Republik juga beralasan bahwa Amerika Serikat sedang menghadapi defisit anggaran yang besar. Menjelang pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang pengeluaran, terlihat bahwa penolakan terhadap bantuan militer ke Ukraina semakin meningkat di kalangan anggota parlemen yang berpandangan konservatif. Banyak dari mereka menolak rancangan undang-undang yang mencakup alokasi dana militer ke Ukraina, bahkan ada yang menyatakan bahwa bantuan tersebut hanya akan memperpanjang perang dan penderitaan rakyat Ukraina (Purnawarta 2024).

Salah satu tokoh Partai Republik, Matt Gaetz dari Florida, menuduh Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, telah diam-diam membuat kesepakatan dengan Presiden Joe Biden. Kesepakatan tersebut dilakukan pada menit-menit terakhir untuk menyetujui anggaran belanja tanpa mencantumkan dana bantuan untuk Ukraina. Sebagai gantinya, Biden disebut-sebut memberikan imbalan agar McCarthy mau melakukan pemungutan suara ulang (Purnawarta 2024).

Sementara itu, Partai Demokrat menunjukkan dukungan penuh terhadap kelanjutan bantuan militer ke Ukraina. Namun, karena mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dipegang oleh Partai Republik, besar kemungkinan pemungutan suara untuk bantuan tersebut akan diblokir (Purnawarta 2024).

Kritik terhadap bantuan ini juga datang dari luar Amerika Serikat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut bahwa perpecahan di Kongres AS mencerminkan perpecahan yang lebih luas di negara-negara Barat. Ia juga menyatakan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Kyiv semakin tidak masuk akal di mata publik Amerika. Bahkan Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, mengecam bantuan militer AS ke Ukraina sebagai tindakan yang “tidak rasional”, dan menyarankan agar AS lebih fokus mengalokasikan sumber daya untuk membantu negara-negara di Amerika Latin (Purnawarta 2024).

Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Republik dalam isu bantuan militer untuk Ukraina memang sesuai dengan peran sebagai *partisan influencer* seperti yang dijelaskan oleh Coplin. Partai Demokrat menjembatani keinginan publik yang mendukung solidaritas dan norma internasional, sementara Partai Republik mewakili aspirasi publik yang lebih kritis terhadap anggaran dan kebijakan luar negeri. Keduanya berperan dalam menyeimbangkan antara tekanan masyarakat dan kebijakan eksekutif, sebagaimana yang dikemukakan oleh William D. Coplin (Coplin 2003, 82).

Dalam konteks kebijakan terhadap Ukraina tahun 2022–2024, Partai Demokrat dan Partai Republik tidak sepenuhnya sependapat. Partai Demokrat secara umum mendukung bantuan militer dan kemanusiaan yang besar sebagai wujud solidaritas terhadap Ukraina dan pembelaan terhadap tatanan internasional berbasis aturan. Sebaliknya, Partai Republik, khususnya dari sayap konservatif dan populis, cenderung menolak bantuan tambahan dengan alasan efisiensi anggaran dan kecurigaan terhadap korupsi di pemerintahan Ukraina.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pada fase awal invasi Rusia tahun 2022, terdapat momen bipartisanship, yakni kesepakatan lintas partai, untuk memberikan dukungan awal kepada Ukraina. Hal ini tercermin dalam pengesahan Ukraine Supplemental Appropriations Act, yang mendapat dukungan dari mayoritas anggota Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik (Congressional Research Service, 2023). Dukungan bipartisan ini memungkinkan Presiden Biden menjalankan kebijakan respons cepat dalam bentuk pengiriman senjata, sanksi ekonomi terhadap Rusia, dan diplomasi internasional.

Seiring waktu, terutama setelah Partai Republik merebut kembali mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada awal 2023, bipartisanship mulai melemah. Dalam beberapa sidang pengesahan anggaran seperti Continuing Resolution, bantuan Ukraina menjadi titik konflik. Banyak anggota Partai Republik mulai menolak mencantumkan pendanaan baru untuk Ukraina, menilai bahwa pemerintah AS harus memprioritaskan masalah domestik seperti defisit anggaran, inflasi, dan keamanan perbatasan (Kornberger, 2024). Dalam pemungutan suara awal 2024, hanya sekitar 101 dari 219 anggota DPR Partai Republik yang mendukung tambahan dana Ukraina, mencerminkan resistensi internal yang besar.

Meskipun demikian, pengaruh Partai Demokrat tetap dominan dalam memajukan bantuan, terutama melalui kendali di Senat dan dukungan dari Presiden Biden. Bahkan dalam situasi di mana DPR dikontrol oleh Partai Republik, para pemimpin Demokrat mampu membentuk koalisi lintas partai moderat, termasuk dengan sebagian anggota Republik yang mendukung NATO dan prinsip-prinsip liberal internasional. Dalam beberapa kasus, strategi pengesahan dilakukan secara

terpisah dari anggaran utama agar bantuan Ukraina tetap berjalan (U.S. GAO, 2024).

Pada akhirnya pengaruh Partai Demokrat yang lebih konsisten dan solid dalam mendukung Ukraina lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan bantuan AS, meskipun terdapat perlawanan dari fraksi konservatif Partai Republik. Politik luar negeri AS terhadap Ukraina selama periode 2022–2024 mencerminkan kombinasi antara bipartisanship terbatas di awal konflik dan kompetisi partai yang meningkat kemudian, yang semuanya sesuai dengan konsep partisan influencers menurut Coplin, di mana partai politik tidak hanya membentuk opini, tetapi memiliki peran nyata dalam keberhasilan atau kegagalan kebijakan luar negeri melalui institusi Kongres.

Dalam perspektif William D. Coplin, partisan influencers tidak hanya mencerminkan opini partai, melainkan juga bertindak sebagai saluran dua arah antara pengambil keputusan eksekutif dan masyarakat, khususnya dalam konteks institusional seperti legislatif (Coplin, 2003, hlm. 82). Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, Kongres, melalui kewenangan konstitusionalnya untuk menyetujui anggaran, memiliki peran sentral dalam menegosiasikan, mengubah, atau memblokir kebijakan luar negeri, termasuk bantuan militer ke negara asing. Oleh karena itu, sikap partai politik di Kongres menjadi indikator penting dari arah kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina, tidak hanya dari segi opini politik, tetapi dalam bentuk keputusan anggaran yang memiliki dampak nyata.

Sejak awal invasi Rusia pada Februari 2022, Partai Demokrat secara konsisten mendorong dan menyetujui alokasi anggaran besar untuk bantuan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Dukungan ini terlihat dalam pengesahan Ukraine

Supplemental Appropriations Act, di mana mayoritas anggota Demokrat mendukung usulan Presiden Joe Biden untuk mengalokasikan lebih dari \$100 miliar bantuan ke Ukraina selama periode 2022–2024 (Congressional Research Service, 2023). Dalam pembahasan anggaran ini, Partai Demokrat tidak hanya menyampaikan dukungan moral, tetapi secara aktif menggunakan suara mayoritasnya di Senat dan koalisi di DPR (pada 2022) untuk menyetujui berbagai paket bantuan, termasuk Presidential Drawdown Authority (PDA) dan Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) (U.S. GAO, 2024). Bagi Partai Demokrat, dukungan ini adalah manifestasi dari prinsip untuk mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan dan solidaritas transatlantik (Smith, 2022).

Namun demikian, sejak Partai Republik merebut kembali mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat pada 2023, dinamika di Kongres berubah signifikan. Banyak anggota Partai Republik, terutama dari sayap konservatif, mulai menunjukkan resistensi terhadap pengeluaran tambahan untuk Ukraina. Dalam beberapa kesempatan, seperti saat pembahasan Continuing Resolution untuk menghindari penutupan pemerintahan (government shutdown), fraksi Republik menolak mencantumkan pendanaan Ukraina dalam rancangan anggaran, memaksa pengesahan dilakukan secara terpisah dan menunda distribusi bantuan secara administratif (Kornberger, 2024). Dalam pemungutan suara yang berlangsung pada awal 2024, hanya 101 anggota DPR dari Partai Republik yang menyetujui tambahan dana untuk Ukraina, sementara sisanya menolak atau abstain, mengindikasikan perpecahan internal yang tajam.

Penolakan ini tidak semata didasari pandangan ideologis, tetapi juga berkaitan dengan tuntutan fiskal dan populisme domestik. Isu defisit anggaran,

transparansi bantuan luar negeri, dan korupsi di Ukraina menjadi argumen utama penentangan. Beberapa tokoh seperti Matt Gaetz bahkan menuduh adanya kesepakatan tersembunyi antara pimpinan DPR dan Presiden Biden untuk mencairkan anggaran militer dengan konsesi politik tertentu (Purnawarta, 2024). Kritik juga datang dari luar AS, termasuk dari Kremlin yang memandang perpecahan di Kongres sebagai tanda lemahnya solidaritas Barat (Purnawarta, 2024).

### ***2.2.3 Interest Influencers***

Dalam teori kebijakan luar negeri, *interest influencers* merujuk pada aktor non-pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan politik luar negeri suatu negara melalui lobi, kampanye, dan advokasi. *Interest influencers* (kepentingan yang mempengaruhi) adalah mengenai citra lingkungan internasional yang memainkan peran yang menentukan dalam upaya mereka, untuk membentuk perilaku para pengambil keputusan politik luar negeri dengan membuat Kelompok Lobi (Coplin 2003, 91). Menurut Coplin (2003), kelompok-kelompok ini berperan penting dalam membentuk persepsi dan kepentingan nasional, terutama dalam konteks dinamika internasional yang kompleks.

Dalam merespons agresi militer Rusia terhadap Ukraina yang berlangsung sejak 2022 hingga 2024, Amerika Serikat tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai aktor penting yang berperan sebagai *interest influencers*. Para aktor ini berasal dari kalangan organisasi non-pemerintah, diaspora, pemerintahan, hingga negara-negara sekutu yang memiliki kepentingan strategis terhadap stabilitas kawasan dan nilai-nilai demokrasi global.

Organisasi Non-Pemerintah (NGO) seperti *Human Rights Watch* memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah AS. Kedua lembaga ini secara aktif mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik Ukraina, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, dan kekerasan terhadap tahanan perang. Laporan-laporan mereka, yang dirilis secara berkala, menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat internasional dan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembuat kebijakan di Amerika Serikat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas terhadap Rusia (Human Rights Watch 2023).

Selain itu, kelompok lobi Ukraina di Amerika Serikat, khususnya melalui *Ukrainian Congress Committee of America (UCCA)* adalah organisasi payung yang mewakili komunitas Ukraina di Amerika Serikat sejak tahun 1940. UCCA memiliki kantor pusat di New York dan biro di Washington, D.C., serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan advokasi, termasuk lobi kepada anggota kongres, kampanye media sosial, dan penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan ke Ukraina. UCCA juga merupakan anggota pendiri *Ukrainian World Congress*, yang mewakili diaspora Ukraina di seluruh dunia (UCCA, 2023).

UCCA turut memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan politik. Mereka tidak hanya mengorganisir demonstrasi dan aksi solidaritas, tetapi juga menggelar kampanye digital dan secara aktif melobi para pejabat tinggi di pemerintahan AS. Melalui upaya mereka, tekanan publik terhadap pemerintah untuk meningkatkan bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina semakin besar. Aksi-aksi mereka mencerminkan kekuatan komunitas diaspora dalam

memengaruhi arah kebijakan luar negeri negara tempat mereka bermukim (Nurwijayati & Machmudi 2022, 50-55).

Di lingkup pemerintahan, Presiden Joe Biden menjadi salah satu tokoh utama dalam mendorong dukungan bagi Ukraina. Dalam berbagai pidato dan kebijakan resmi, Biden menekankan bahwa keterlibatan AS dalam konflik ini bukan hanya soal membantu sekutu, tetapi juga merupakan komitmen moral dan strategis untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan menahan ekspansi otoritarianisme yang dilakukan Rusia. Selain Presiden, pejabat-pejabat eksekutif lainnya seperti Menteri Luar Negeri dan para diplomat Amerika Serikat di Ukraina juga berperan besar dalam menyampaikan informasi situasi di lapangan serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan yang konkret (Council on Foreign Relations 2023).

Dukungan terhadap Ukraina juga diperkuat oleh peran negara-negara sekutu Amerika Serikat, seperti Kanada dan Inggris. Kedua negara ini secara aktif bekerja sama dengan organisasi internasional seperti NATO dalam menyalurkan bantuan militer, pelatihan pasukan, dan dukungan kemanusiaan kepada Ukraina. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa respons Amerika Serikat tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik, tetapi juga melalui koordinasi erat dengan sekutu dalam aliansi internasional (Government of Canada & NATO 2025).

Melalui berbagai aktor tersebut, terlihat bahwa respons AS terhadap agresi Rusia sangat dipengaruhi oleh tekanan dan masukan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan strategis, moral, dan politik. Para *interest influencers* ini membentuk ekosistem kebijakan luar negeri yang dinamis, di mana suara masyarakat sipil, komunitas internasional, serta pejabat tinggi pemerintah saling

bersinergi dalam menentukan arah kebijakan Amerika Serikat terhadap krisis di Ukraina.

Dalam melakukan lobi untuk mendukung Ukraina mereka melibatkan berbagai anggota parlemen hingga organisasi non-pemerintah, serta menciptakan adanya tekanan-tekanan yang diperlukan agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam mendukung Ukraina. Upaya ini menjadi cukup penting untuk memastikan bahwa Ukraina mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan yang ada (Peterson 2023, 4).

#### **2.2.4 Mass Influencers**

*Mass influencers* (massa yang mempengaruhi) adalah menggunakan media komunikasi massa (surat, kabar, radio, dan televisi). Mereka dengan mengacu pada iklim opini yang dimiliki oleh populasi yang diperimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. *mass influencers* ini memiliki tipe yang terwujud melalui adanya opini publik yang tertuang pada sebuah media massa. Opini yang diberikan oleh *mass influencers* biasanya dapat dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kebijakan dalam pembuatan strategi untuk merasionalisasikan suatu strategi yang dapat menghindari eskalasi keberlangsungan konflik yang ada dan dapat berpotensi sangat merugikan (Coplin 2003, 88).

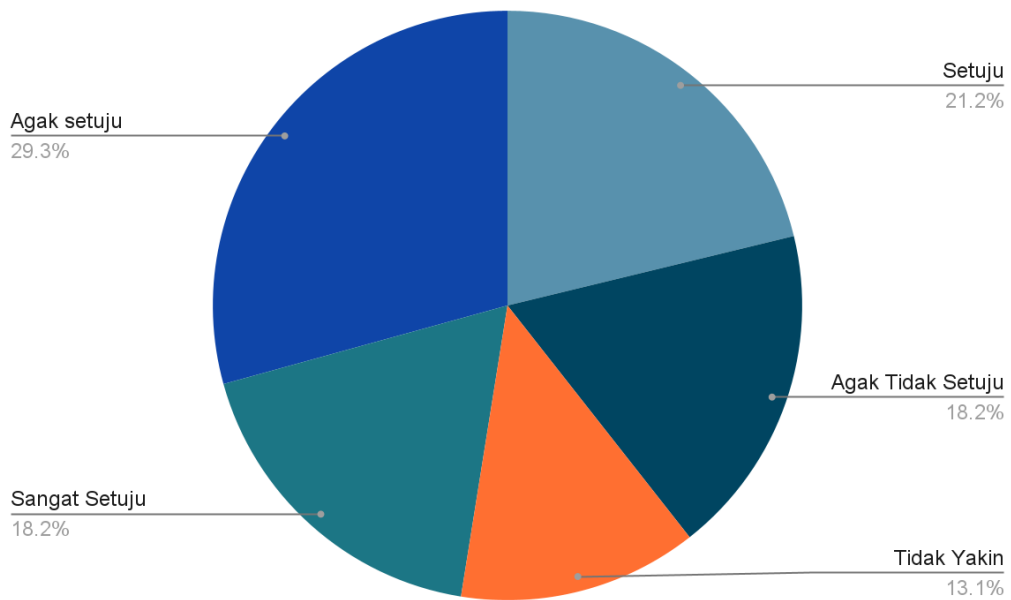
Dukungan publik Amerika terhadap Ukraina juga telah terlihat jelas melalui media sosial, di mana banyak pengguna mengganti foto profil mereka dengan bendera Ukraina sebagai bentuk solidaritas. Fenomena ini mencerminkan adanya dukungan emosional dan politik yang luas terhadap Ukraina, terutama di kalangan

generasi muda yang aktif di platform-platform seperti Twitter dan Instagram. Dan seperti halnya diagram dibawah ini mengenai respon Pemerintah Biden terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

Dalam kerangka teori Coplin (2003), *Mass Influencers* merujuk pada aktor-aktor sosial yang mempengaruhi kebijakan luar negeri melalui pembentukan opini publik secara luas. Media massa termasuk surat kabar, radio, televisi, dan kini media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu internasional. Opini yang terbentuk di masyarakat sering kali dijadikan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi luar negeri yang rasional dan berorientasi pada dukungan publik domestik (Coplin 2003, 88).

Dalam konteks invasi Rusia terhadap Ukraina, opini publik Amerika Serikat menjadi salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi sikap pemerintah, termasuk dalam menentukan besaran dukungan yang diberikan kepada Ukraina. Data dari Pew Research Center (2022) menunjukkan bahwa tanggapan publik terhadap kebijakan Presiden Biden mengenai krisis Ukraina sangat beragam.

**Diagram 1. 1 Pendapat Masyarakat Amerika Serikat terhadap  
Dukungan US ke Ukraina**

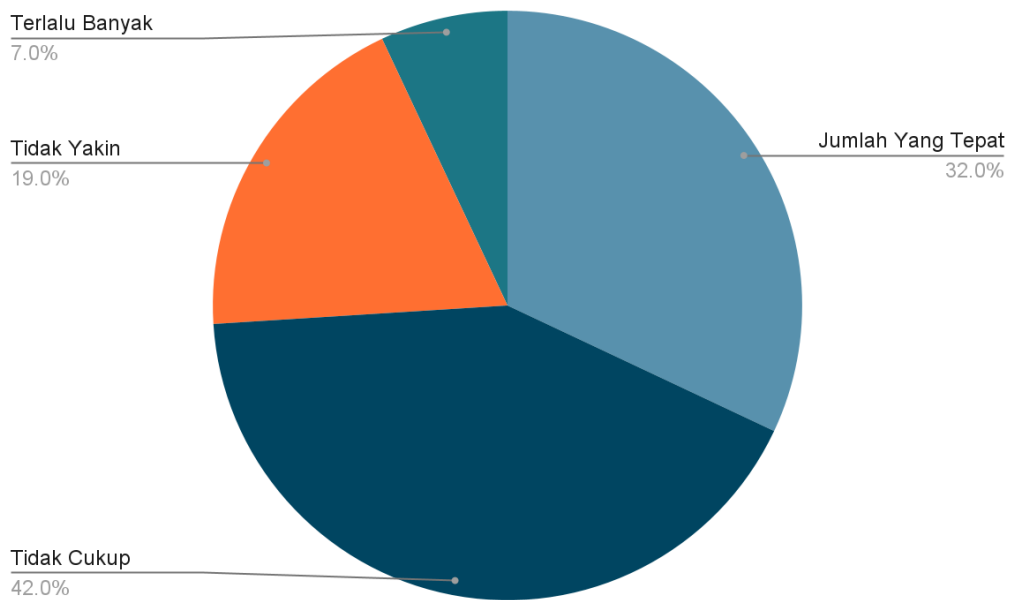


Sumber: Pew Research Center (2022)

Tiga minggu setelah invasi militer Rusia ke Ukraina hasil survei menunjukkan bahwa 47% warga Amerika menyetujui penanganan Biden terhadap invasi Rusia, sementara 39% tidak menyetujui, dan 13% menyatakan tidak yakin. Ini menunjukkan bahwa hampir separuh masyarakat mendukung kebijakan tersebut, tetapi ada juga kritik yang cukup besar dari kelompok yang tidak sepakat.

Lebih lanjut, dalam hal tingkat dukungan AS terhadap Ukraina, sekitar 42% responden merasa bahwa AS *belum memberikan cukup dukungan*, 32% menganggap dukungan yang diberikan sudah tepat, 7% merasa AS memberikan *terlalu banyak*, dan 19% menyatakan tidak yakin. Pola ini menggambarkan adanya tekanan publik yang signifikan agar pemerintah AS meningkatkan dukungannya terhadap Ukraina, sekaligus menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam kebijakan luar negeri agar tetap mendapatkan legitimasi domestik.

**Diagram 1. 2 Pendapat Warga AS terkait Dukungan Pemerintah AS terhadap Ukraina**



Sumber: Pew Research Center (2022)

Salah satu aspek penting dari pengaruh opini publik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Ukraina adalah adanya dukungan bipartisan terhadap kerja sama internasional. Hal ini diperlihatkan dengan jelas melalui survei Pew Research Center yang dilakukan pada Maret 2022.

**Tabel 1. 1 Dukungan Luas di Kedua Partai Bagi AS untuk Bekerja Sama dengan Sekutu dalam Krisis Ukraina**

Keterangan	Pendekatan yang salah berdasarkan kerja sama dengan sekutu warga Amerika Serikat	Pendekatan yang tepat berdasarkan kerja sama dengan sekutu warga Amerika Serikat
<b>Total</b>	18%	79%
<b>Perwakilan Republik</b>	24%	73%

<b>Perwakilan</b>	<b>Partai</b>	13%	85%
<b>Demokrat</b>			

Sumber: Pew Research Center (2022)

Gambar menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika Serikat dari kedua partai besar menganggap bahwa bekerja sama dengan sekutu internasional merupakan langkah yang tepat dalam merespons invasi Rusia ke Ukraina. Secara keseluruhan, 79% responden menyatakan bahwa kerja sama erat dengan sekutu merupakan "pendekatan yang tepat" (*right approach*), sedangkan hanya 18% yang menganggapnya sebagai "pendekatan yang salah" (*wrong approach*).

Jika dilihat berdasarkan afiliasi politik:

- 73% dari Partai Republik dan independen yang condong ke Republik mendukung pendekatan kerja sama ini, meskipun kelompok ini sebelumnya dikenal lebih skeptis terhadap multilateralisme.
- 85% dari Partai Demokrat dan independen yang condong ke Demokrat juga mendukung kerja sama erat dengan sekutu.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan ideologis antara kedua partai, opini publik dari kedua belah pihak cenderung mendukung kebijakan luar negeri yang kolaboratif dan berbasis aliansi. Hal ini penting karena memperlihatkan bahwa dukungan terhadap Ukraina bukan hanya agenda satu partai, tetapi merupakan sikap yang relatif konsisten di seluruh spektrum politik Amerika.

Dalam konteks *mass influencers*, opini semacam ini mencerminkan konsensus publik yang kuat, yang dapat memberikan legitimasi politik bagi

pemerintah dalam melanjutkan kerja sama internasional serta pengiriman bantuan ekonomi dan militer.

**Tabel 1. 2 Pendukung Partai Republik Lebih Cenderung Mengatakan AS Tidak Memberikan Dukungan yang Cukup kepada Ukraina Dibandingkan Pendukung Partai Demokrat**

Keterangan	AS tidak cukup memberikan dukungan kepada Ukraina	Dukungan AS sudah dalam jumlah yang tepat	Dukungan AS terlalu banyak	Masyarakat mengaku tidak yakin
Total	42%	32%	7%	19%
Perwakilan Republik	49%	23%	9%	17%
Melestarikan	54%	21%	9%	15%
Mod/Lib	41%	28%	10%	21%
Perwakilan Demokrat	38%	39%	5%	18%
Kontra	34%	40%	6%	19%
Liberal	43%	37%	4%	16%

Sumber: Pew Research Center (2022)

Selain dukungan terhadap kerja sama dengan sekutu, opini publik Amerika Serikat juga sangat terpolarisasi dalam hal tingkat dukungan yang diberikan kepada

Ukraina. Data dari Pew Research Center (2022) memperlihatkan bahwa sebagian besar warga Amerika merasa bahwa bantuan AS masih belum cukup.

Dari total responden:

- a. 42% mengatakan AS tidak memberikan dukungan yang cukup kepada Ukraina,
- b. 32% menyatakan dukungan AS sudah dalam jumlah yang tepat,
- c. 7% menilai dukungan AS terlalu banyak, dan
- d. 19% masyarakat mengaku tidak yakin.

Ketika dilihat berdasarkan preferensi partai:

- a. Partai Republik dan simpatisannya (Rep/Lean Rep): 49% mengatakan AS tidak memberikan cukup dukungan, dan hanya 9% mengatakan terlalu banyak. Kaum Konservatif Republik bahkan lebih tinggi lagi, dengan 54% menilai bantuan masih kurang.
- b. Partai Demokrat dan simpatisannya (Dem/Lean Dem): lebih seimbang 38% mengatakan kurang, sementara 39% mengatakan dukungan sudah tepat. Hanya 5% yang menilai AS terlalu banyak membantu Ukraina.

Perbedaan juga terlihat dalam spektrum ideologis internal kedua partai:

- Di Partai Republik, kaum konservatif lebih vokal dibanding moderat dan liberal.
- Di Partai Demokrat, kaum liberal lebih cenderung menginginkan peningkatan bantuan dibanding kelompok moderat/konservatif.

Yang menarik, di antara mereka yang tidak menyetujui cara pemerintahan Biden menangani krisis, mayoritas (54%) tetap menilai bahwa AS belum cukup membantu Ukraina. Ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan bukan berasal dari

kelebihan dukungan, melainkan justru dari harapan agar AS lebih aktif. Sebaliknya, di antara mereka yang mendukung kebijakan Biden, sekitar 48% percaya bahwa bantuan sudah cukup, dan 40% ingin ada peningkatan. Hanya 2% dari kelompok ini yang menilai AS terlalu banyak membantu.

Hasil survei Pew Research Center (2022) secara empiris menguatkan kerangka teori *Mass Influencer* dari Coplin (2003), yang menyatakan bahwa opini publik sebagaimana dibentuk dan disalurkan melalui media massa, lembaga survei, dan ekspresi sosial-politik memiliki potensi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Dalam teorinya, Coplin menjelaskan bahwa para pembuat kebijakan mempertimbangkan iklim opini publik dalam merancang strategi internasional, terutama ketika opini tersebut terbentuk secara luas dan konsisten di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan legitimasi domestik, mencegah oposisi politik, dan menjaga stabilitas dukungan terhadap kebijakan luar negeri (Coplin 2003, 88).

Dalam konteks invasi Rusia terhadap Ukraina, opini publik Amerika Serikat terbukti menjadi kekuatan sosial-politik yang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Sejak awal 2022, ekspresi solidaritas publik terhadap Ukraina muncul secara luas di media sosial, misalnya penggunaan simbol bendera Ukraina di profil media sosial, kampanye #StandWithUkraine, hingga protes publik mendesak tindakan tegas terhadap Rusia. Dukungan publik ini mendahului beberapa keputusan strategis seperti pengiriman senjata, pengenaan sanksi ekonomi, dan pidato resmi Presiden Biden.

Data survei Pew Research Center (2022) menunjukkan bahwa opini publik terbentuk sejak tiga minggu setelah invasi dimulai. Dalam survei nasional tersebut,

47% warga Amerika menyetujui penanganan Presiden Biden terhadap krisis Ukraina, dengan 42% responden menyatakan bahwa pemerintah belum memberikan cukup dukungan. Temuan ini menandakan bahwa opini publik mendorong pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan, bukan hanya mendukung keputusan yang sudah ada.

Sebagai respon terhadap tekanan opini publik ini, pemerintah Amerika Serikat kemudian mengambil beberapa kebijakan konkret yang dapat ditelusuri sebagai bentuk respons terhadap tekanan mass influencers, antara lain:

1. Peningkatan Bantuan Militer

Pemerintah mengesahkan berbagai program bantuan militer seperti Presidential Drawdown Authority (PDA) dan Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), hingga total melebihi \$175 miliar per 2024. Publik yang merasa bahwa Ukraina “belum cukup dibantu” menjadi dorongan psikopolitik untuk mempercepat keputusan ini (Council on Foreign Relations, 2024).

2. Bantuan Ekonomi dan Kemanusiaan

Respons publik terhadap krisis kemanusiaan di Ukraina juga melahirkan tekanan terhadap Kongres dan Gedung Putih agar tidak hanya memberikan senjata, tetapi juga pinjaman, bantuan pengungsi, dan dukungan media independen Ukraina.

3. Sanksi Ekonomi terhadap Rusia

Keinginan publik agar AS mengambil langkah nyata terhadap Rusia menjadi landasan moral untuk pengesahan sanksi keuangan dan perdagangan, termasuk larangan impor minyak, pembekuan aset, dan pemutusan SWIFT (Biden Administration, 2022).

#### 4. Koordinasi Aliansi Multilateral

Karena opini publik mendukung kerja sama internasional, pemerintah memperkuat konsolidasi NATO, G7, dan UE. Survei Pew menunjukkan bahwa 79% warga AS menganggap kerja sama dengan sekutu sebagai pendekatan yang tepat.

#### 5. Pernyataan Resmi Pemerintah yang Mencerminkan Suara Publik

Dalam beberapa pidato resmi Presiden Biden dan briefing Gedung Putih, narasi yang diangkat adalah “menjawab keprihatinan publik” dan “merespons keinginan rakyat Amerika untuk berdiri bersama demokrasi”.

## 2.2 Pengambil Keputusan

Menurut William D. Coplin dalam karyanya tentang determinan politik luar negeri ini kita harus memberi tempat untuk membahas peran pengambil keputusan tanpa terperangkap, sehingga kita menjelaskan keseluruhan politik luar negeri menurut perilaku seorang pemimpin (Coplin 2003, 169). Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks kepemimpinan Presiden Joe Biden, terutama dalam menghadapi agresi militer Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada tahun 2022. Dalam menghadapi adanya situasi Biden dan timnya harus melakukan keputusan yang strategis dan terinformasi. Coplin menekankan bahwa pentingnya adanya pengumpulan data dan situasi untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Dalam hal ini, Biden mengandalkan intelijen dan informasi dari berbagai sumber untuk memahami dinamika konflik dan merespons dengan cara yang efektif. Keputusan Biden untuk memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada Ukraina yang mencerminkan mengenai pemahaman yang mendalam tentang pentingnya mempertahankan adanya kedaulatan negara dan mencegah agresi.

Biden melakukan pengiriman senjata dan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pertahanan Ukraina, tetapi juga untuk mengirimkan pesan tegas kepada Rusia bahwa agresi tidak hanya akan ditoleransi. Dalam konteks ini, keputusan Biden mencerminkan dimana dalam mengambil keputusan yang harus mampu menganalisis adanya situasi dengan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis respon Biden terhadap agresi militer Rusia terhadap Ukraina. Biden membuat keputusan yang tidak efektif dalam merespons situasi kasus saat ini (Washington D.C 2023, 10-15).

**BAB 3**

**EKONOMI MILITER DAN KONTEKS INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT DALAM KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA KONFLIK RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022-2024**

Ketegangan yang meningkat dengan latihan militer bersama anggota NATO dengan memperkuat aliansi dan meningkatkan kerjasama militer. Hal ini menjadi peningkatan latihan militer dengan pengiriman bantuan militer ke Ukraina. Negara Amerika Serikat berkomitmen memberikan dukungan yang lebih besar terhadap Ukraina yang tidak hanya mencerminkan solidaritas tetapi juga kepentingan strategis untuk menjaga stabilitas Eropa Timur. Sehingga pemerintah menjelaskan kepada publik tentang pentingnya membuat dukungan dalam konteks keamanan nasional dengan menciptakan tekanan dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran pertahanan (Handayani 2023, 10).

William D. Coplin dalam bukunya “Pengantar Politik Internasional” (2003) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri negara besar seperti Amerika Serikat dapat dianalisis melalui *issue areas* atau bidang isu yang menjadi sasaran atau alat dalam mencapai tujuan nasional. Coplin menyebutkan beberapa bidang isu penting, di antaranya:

### **3.1. Kondisi Ekonomi dan Militer**

#### ***3.1.1 Dimensi Kemampuan Ekonomi***

Dalam kemampuan ekonomi suatu negara ini memainkan peran penting dalam politik luar negeri. Untuk mengamati kemampuan ekonomi sebagai alat

politik luar negeri dengan membahas dalam topik pembahasan ini mencakup (1) Kapasitas Produksi barang dan Jasa dan (2) Ketergantungan relatif pada perdagangan dan finansial internasional (Coplin 2003, 115).

Dalam kajian politik luar negeri, kemampuan ekonomi suatu negara merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebijakan dan posisinya di kancah internasional. Menurut Coplin (2003), terdapat dua aspek utama dalam menilai kemampuan ekonomi sebuah negara:

Coplin (2003) menjelaskan bahwa kapasitas produksi barang dan jasa dijelaskan sebagai salah satu elemen kunci dalam menentukan kekuatan nasional suatu negara. Konsep ini merujuk pada sejauh mana sebuah negara mampu memproduksi berbagai kebutuhan ekonominya sendiri, baik dalam bentuk barang seperti makanan, pakaian, senjata, kendaraan, maupun jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kapasitas produksi yang tinggi mencerminkan tingkat kemandirian dan ketahanan suatu negara dalam menghadapi dinamika global. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan domestik secara mandiri cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih kuat, karena tidak bergantung penuh pada impor dari negara lain. Hal ini juga mendukung terciptanya ketahanan nasional yang lebih solid (Coplin 2003, 116).

Lebih jauh, kapasitas produksi juga berkaitan langsung dengan posisi tawar negara dalam politik internasional. Negara yang mampu menghasilkan surplus barang dan jasa dapat berperan aktif dalam perdagangan global, memberi bantuan ekonomi kepada negara lain, serta menjalin kerja sama strategis yang menguntungkan secara diplomatik. Selain itu, kemampuan untuk memproduksi alat-alat militer dan logistik menjadi aspek vital dalam mendukung kekuatan

militer, yang secara tidak langsung memperkuat posisi diplomasi negara tersebut. Terakhir, negara yang terus berinovasi dan menghasilkan produk unggulan seperti dalam bidang teknologi tinggi atau energi terbarukan akan memiliki daya saing global yang tinggi dan dihormati oleh komunitas internasional (Coplin 2003, 116).

Pada tahun 2023, sektor manufaktur menyumbang sekitar \$2,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat, yang setara dengan 10,2% dari total PDB nasional. Jika memperhitungkan dampak tidak langsung (seperti permintaan input dari sektor lain), kontribusi total sektor manufaktur terhadap PDB mencapai 17,1% (National Institute of Standards and Technology 2023). Amerika Serikat menempati posisi kedua secara global dalam nilai tambah manufaktur dengan total \$2,4 triliun pada tahun 2021, hanya kalah dari Tiongkok. Angka ini mencerminkan kapasitas produksi tinggi dalam berbagai sektor strategis (National Institute of Standards and Technology 2023).

Produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur AS mengalami penurunan sebesar 1,0% antara kuartal kedua tahun 2022 dan 2023. Namun, AS tetap berada di posisi kesembilan secara global dalam hal output per jam kerja di sektor manufaktur, mencerminkan efisiensi tinggi meskipun menghadapi tantangan struktural. Beberapa sub-sektor dominan dalam industri manufaktur AS adalah produk elektronik dan komputer, manufaktur kimia, serta makanan dan minuman. Produk teknologi tinggi berkontribusi sekitar 37% terhadap total output manufaktur, menandakan pentingnya inovasi dalam struktur ekonomi nasional (National Institute of Standards and Technology 2023).

Coplin (2003) menjelaskan bahwa ketergantungan pada perdagangan dan sistem keuangan internasional merupakan salah satu faktor penting yang

mempengaruhi kekuatan maupun kerentanan suatu negara di dalam sistem politik global. Di era globalisasi ini, tidak ada negara yang benar-benar bisa berdiri sendiri. Negara-negara saling terhubung dan membutuhkan satu sama lain, terutama dalam hal perdagangan barang dan jasa, pertukaran modal, serta akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Kebergantungan ini bisa menjadi sumber kekuatan bila dikelola dengan strategi yang tepat, namun juga dapat menjadi kelemahan serius bila terlalu bergantung pada pihak luar tanpa pengawasan yang bijak (Coplin 2003, 121).

Ketergantungan ekonomi ini berarti bahwa negara yang sangat bergantung pada ekspor-impor dan aliran dana asing, seperti investasi luar negeri atau pinjaman dari lembaga internasional, akan sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global. Ketika terjadi krisis di negara mitra dagang utama, dampaknya bisa langsung terasa, seperti penurunan ekspor, penurunan investasi asing, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, Coplin juga menyoroti bagaimana ketergantungan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan internasional. Negara-negara yang mengandalkan bantuan dari lembaga seperti IMF atau Bank Dunia kerap kali harus menerima syarat-syarat tertentu yang bisa mengurangi kedaulatan mereka dalam menetapkan kebijakan ekonomi (Coplin 2003, 123).

Lebih jauh lagi, ketergantungan semacam ini juga bisa dimanfaatkan oleh negara atau institusi tertentu sebagai alat tekanan politik. Misalnya, negara yang menjadi pemasok utama energi atau bahan pangan dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara yang bergantung padanya. Oleh karena itu, Coplin menekankan pentingnya diversifikasi dalam perdagangan dan sumber pembiayaan. Negara perlu memperluas pasar, menjalin

kerja sama dengan berbagai mitra, dan membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan tangguh. Dengan cara ini, negara dapat mengurangi risiko dan memperkuat posisinya di panggung internasional, tanpa harus kehilangan kendali atas arah kebijakan ekonominya sendiri (Coplin 2003, 123).

Tingkat ketergantungan Amerika Serikat terhadap perdagangan dan finansial internasional sangat mencerminkan apa yang dijelaskan oleh Coplin (2003), bahwa dalam sistem politik global modern, tidak ada negara yang benar-benar mandiri secara ekonomi. Berdasarkan data dari U.S. Bureau of Economic Analysis (2024), nilai total ekspor Amerika Serikat pada tahun 2023 mencapai sekitar 3.053,5 miliar dolar AS, sementara nilai impor mencapai 3.826,9 miliar dolar AS, menghasilkan defisit perdagangan sebesar 773,4 miliar dolar AS, atau sekitar 2,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka ini menunjukkan bahwa AS merupakan negara dengan tingkat keterlibatan perdagangan yang sangat tinggi, baik sebagai eksportir maupun importir.

Di sisi lain, ketergantungan AS terhadap arus modal global juga tercermin dari posisinya dalam investasi langsung. Total posisi investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Amerika Serikat pada tahun 2023 mencapai 5,39 triliun dolar AS, mengalami peningkatan sebesar 227,0 miliar dolar dari tahun sebelumnya. Sektor manufaktur merupakan sektor penerima FDI terbesar, dengan nilai investasi sebesar 2,22 triliun dolar AS (U.S. Bureau of Economic Analysis, 2024). Ini menandakan bahwa sektor industri strategis AS sangat bergantung pada modal asing, baik untuk pengembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, maupun ekspansi kapasitas produksi.

Sebaliknya, Amerika Serikat juga merupakan salah satu investor terbesar di dunia. Posisi investasi langsung yang dilakukan AS di luar negeri mencapai 6,68 triliun dolar AS pada tahun 2023, meningkat sebesar 364,0 miliar dolar dari tahun sebelumnya. Kawasan Eropa, terutama negara-negara seperti Irlandia, Swiss, dan Belanda, menjadi tujuan utama investasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa AS tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga pelaku aktif dalam dinamika finansial global (U.S. Bureau of Economic Analysis 2024).

Selain itu, sektor jasa juga memainkan peran penting dalam ketergantungan ekonomi internasional AS. Nilai ekspor jasa internasional AS mencapai 1.026,6 miliar dolar AS, sedangkan impor jasa berada pada angka 748,2 miliar dolar AS. Ini menunjukkan surplus dalam perdagangan jasa yang berkontribusi terhadap stabilitas neraca berjalan (U.S. Bureau of Economic Analysis 2024).

Dimensi ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Coplin (2003), terdiri dari dua aspek utama: kapasitas produksi dan ketergantungan pada sistem perdagangan serta finansial internasional. Kapasitas produksi yang tinggi, ditunjukkan oleh kontribusi sektor manufaktur sebesar \$2,3 triliun terhadap PDB AS pada tahun 2023, menjadi dasar kuat bagi Amerika Serikat dalam menyediakan bantuan ekonomi dan militer kepada Ukraina. AS memiliki infrastruktur industri yang mampu mendukung produksi alat pertahanan, amunisi, kendaraan tempur, dan kebutuhan logistik lainnya dalam skala besar dan cepat.

Di sisi lain, ketergantungan AS terhadap perdagangan dan sistem finansial internasional menunjukkan betapa terintegrasinya negara ini dalam sistem global. Dengan nilai ekspor sebesar \$3.053,5 miliar dan impor sebesar \$3.826,9 miliar pada tahun 2023 (U.S. Bureau of Economic Analysis 2024), AS berada dalam posisi

yang mengharuskannya menjaga stabilitas tatanan ekonomi global. Oleh karena itu, konflik seperti invasi Rusia ke Ukraina bukan hanya ancaman geopolitik, tetapi juga berpotensi mengguncang pasar energi, pangan, dan keuangan internasional yang bisa berdampak langsung terhadap ekonomi domestik Amerika Serikat. Kepentingan ini mendorong AS untuk bertindak cepat dan tegas, tidak hanya demi solidaritas ideologis terhadap negara demokrasi seperti Ukraina, tetapi juga demi stabilitas struktural dalam sistem ekonomi internasional yang menopang kekuatannya sendiri.

### *3.1.2 Dimensi Kemampuan Militer*

Menurut Coplin (2003), kemampuan militer dijelaskan sebagai salah satu dimensi penting dari kekuatan nasional sebuah negara. Coplin menekankan bahwa kemampuan militer tidak hanya dilihat dari seberapa besar jumlah tentara atau banyaknya senjata yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana negara tersebut menggunakan kekuatan militernya secara strategis dalam mempertahankan kepentingan nasional dan memperkuat posisinya dalam sistem internasional (Coplin 2003, 124).

Kemampuan militer suatu negara mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah dan kualitas personel militer, kecanggihan teknologi persenjataan, sistem logistik dan mobilisasi, hingga kapasitas pertahanan dan serangan. Negara yang memiliki militer kuat umumnya lebih dihormati dan disegani di tingkat global, karena memiliki kapasitas untuk mempertahankan diri dari ancaman luar maupun untuk memproyeksikan kekuatan ke wilayah lain jika diperlukan (Coplin 2003, 125).

Namun, Coplin juga mengingatkan bahwa memiliki kekuatan militer besar bukan jaminan keberhasilan dalam hubungan internasional. Keberhasilan militer sangat bergantung pada strategi politik yang tepat, koordinasi antar lembaga pertahanan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Negara dengan militer besar tapi tidak efisien justru bisa terbebani secara ekonomi dan kehilangan dukungan politik dari dalam negeri (Coplin 2003, 125-126). Coplin menjelaskan bahwa kemampuan militer tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari beberapa dimensi yang saling berkaitan dan menentukan seberapa efektif kekuatan militer suatu negara dapat digunakan dalam konteks politik internasional. Berikut adalah beberapa dimensi utama kemampuan militer menurut Coplin (2003).

Dimensi ini merujuk pada kemampuan nyata suatu negara dalam mengorganisasi, menggerakkan, dan menggunakan kekuatannya secara efektif. Tidak semua negara yang memiliki senjata atau tentara dalam jumlah besar bisa secara otomatis menggunakannya dengan efisien. Yang menjadi perhatian utama adalah seberapa siap angkatan bersenjata negara tersebut digunakan dalam konflik atau intervensi. Ini mencakup kecepatan mobilisasi pasukan, kesiapan logistik, strategi komando, dan integrasi antara angkatan darat, laut, dan udara. Negara yang punya kapasitas tinggi dalam penggunaan kekuatannya biasanya juga punya sistem pelatihan dan teknologi yang mendukung (Coplin 2003, 126).

Dimensi kapasitas penggunaan kekuatan militer merujuk pada kemampuan nyata suatu negara dalam mengorganisasi, menggerakkan, dan menggunakan kekuatan bersenjata secara efektif. Ini bukan hanya soal jumlah personel atau persenjataan, melainkan juga menyangkut kesiapan logistik, strategi komando,

interoperabilitas antar cabang militer (darat, laut, udara), serta kecepatan dalam mobilisasi. Negara yang memiliki sistem pelatihan terpadu, dukungan teknologi canggih, dan infrastruktur militer yang matang akan memiliki kapasitas militer yang lebih fungsional dalam praktik operasional (Coplin 2003, 128).

Dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap agresi militer Rusia ke Ukraina pada tahun 2022–2024, dimensi ini sangat menonjol. Amerika Serikat tidak hanya memberikan dukungan militer kepada Ukraina secara simbolik, tetapi juga telah menunjukkan kecepatan dan efisiensi tinggi dalam pengiriman bantuan militer, pelatihan, serta penempatan pasukan di Eropa Timur (Coplin 2003, 128).

Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, AS telah mengirim lebih dari \$44 miliar dalam bentuk bantuan keamanan kepada Ukraina. Bantuan ini mencakup sistem pertahanan udara seperti Patriot dan NASAMS, roket HIMARS, tank M1 Abrams, serta amunisi artileri, drone, dan sistem anti-pesawat portabel. Ini menunjukkan kapasitas logistik dan dukungan militer AS yang mampu merespons dengan cepat dan skala besar (U.S. Department of Defense 2024).

AS juga memainkan peran penting dalam pelatihan tentara Ukraina. Pelatihan dilakukan baik di wilayah Eropa maupun dalam kerangka kerja sama bilateral, untuk memastikan bahwa bantuan peralatan yang diberikan dapat digunakan secara efektif di medan tempur (Congressional Research Service 2024).

Semua tindakan ini menggarisbawahi tingginya kapasitas militer AS tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga dalam hal koordinasi strategis dan pengaruh politik. Seperti yang ditegaskan oleh Coplin (2003), keberhasilan sebuah negara dalam menggunakan kekuatan militer sebagai alat politik luar negeri bergantung

pada kesiapan dan efisiensi dalam mobilisasi dan pelaksanaan strategi militer. Dalam hal ini, respons militer AS terhadap konflik Ukraina mencerminkan sinergi antara kekuatan keras (*hard power*) dan tujuan diplomatiknya dalam menjaga stabilitas internasional (Coplin 2003, 129).

Coplin juga menekankan pentingnya kemandirian dalam bidang militer. Negara yang terlalu tergantung pada sumber daya dari luar negeri seperti impor senjata, pelatihan militer dari negara lain, atau bantuan logistik akan lebih rentan saat terjadi krisis. Ketika pasokan senjata atau komponen penting dari luar terhenti (misalnya karena embargo atau konflik diplomatik), maka kekuatan militer bisa langsung melemah. Oleh karena itu, semakin mandiri sebuah negara dalam memproduksi dan menopang kekuatan militernya sendiri, semakin besar pula daya tahan militernya dalam jangka panjang (Coplin 2003, 130).

Dalam teori yang dikemukakan oleh Coplin (2003), kemandirian militer menjadi aspek strategis yang sangat penting. Negara yang terlalu bergantung pada sumber daya eksternal baik itu dalam bentuk impor senjata, pelatihan militer, atau dukungan logistik cenderung lebih rentan dalam menghadapi dinamika konflik internasional. Ketika terjadi gangguan pasokan akibat embargo atau konflik diplomatik, maka kemampuan negara tersebut dalam mempertahankan kekuatan militernya bisa terganggu secara langsung (Coplin 2003, 130).

Dalam konteks Amerika Serikat, meskipun dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, ketergantungan terhadap beberapa rantai pasokan internasional dalam industri pertahanan tetap menjadi perhatian serius. Laporan dari National Defense Industrial Association (NDIA) pada tahun 2022 mencatat bahwa basis industri pertahanan AS menghadapi tantangan struktural,

termasuk keterbatasan kapasitas produksi domestik, ketergantungan pada komponen impor, dan kerentanan dalam rantai pasok global. Hal ini terutama terjadi dalam sektor teknologi tinggi dan suku cadang militer penting (NDIA 2022).

Sebagai contoh, dalam konteks penggunaan sistem persenjataan modern seperti F-35, laporan dari Government Accountability Office (GAO) pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa kesiapan operasional pesawat F-35 menurun secara konsisten dari tahun fiskal 2019 hingga 2023. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya pemeliharaan dan ketergantungan pada pasokan suku cadang tertentu dari mitra luar negeri. Total biaya siklus hidup pesawat ini diperkirakan mencapai \$1,58 triliun, yang menimbulkan kekhawatiran terkait efisiensi dan keberlanjutan operasional jangka panjang (GAO 2023).

Meskipun demikian, upaya peningkatan kemandirian terus dilakukan. Menurut laporan Defense News (2024), adanya dorongan untuk meningkatkan produksi domestik telah menyebabkan peningkatan pendapatan di kalangan perusahaan pertahanan terbesar AS, yang termasuk dalam daftar “Top 100 Defense Companies.” Perusahaan-perusahaan ini meningkatkan kapasitas produksi dan berinvestasi dalam pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global (Defense News 2024).

Ketergantungan Amerika Serikat pada arus modal dan investasi asing juga relevan dalam konteks ini. Data dari U.S. Bureau of Economic Analysis (2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor manufaktur AS merupakan penerima terbesar dari investasi asing langsung (FDI), dengan total nilai mencapai \$5,39 triliun. Ini mencerminkan bahwa beberapa sektor industri strategis, termasuk pertahanan, masih menerima pengaruh dari kepemilikan dan modal asing, yang

berpotensi mempengaruhi kebijakan produksi dan distribusi strategis saat terjadi krisis global (U.S. Bureau of Economic Analysis 2024).

Dalam perspektif hubungan internasional, kondisi ini mencerminkan pentingnya *strategic autonomy* bagi kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Ketika menghadapi ancaman nyata seperti agresi militer Rusia ke Ukraina, kemandirian dalam industri pertahanan menjadi kunci untuk memastikan kecepatan respons dan kesinambungan dukungan militer terhadap sekutu. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri AS ke depan sangat bergantung pada kemampuan domestik untuk menopang kekuatan militer secara mandiri baik dari sisi produksi, logistik, maupun penguasaan teknologi (Coplin 2003, 130).

Dimensi ini berkaitan dengan kondisi keamanan dalam negeri yang mempengaruhi penggunaan kekuatan militer. Jika sebuah negara mengalami konflik internal seperti perang saudara, pemberontakan, atau ketegangan politik domestik, maka sebagian besar kekuatan militer akan tersedot untuk menangani masalah dalam negeri. Akibatnya, kapasitas untuk menghadapi ancaman eksternal atau berperan dalam politik internasional menjadi lemah. Negara yang stabil secara politik dan sosial akan lebih bebas menggunakan militernya untuk tujuan luar negeri, dibandingkan negara yang sibuk menyelesaikan masalah di dalam negerinya sendiri (Coplin 2003, 130).

Dalam teori kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, stabilitas internal suatu negara merupakan prasyarat utama bagi kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan militer secara eksternal. Coplin (2003) menyebut bahwa negara yang sibuk dengan konflik domestik seperti pemberontakan, ketegangan politik, atau krisis sosial cenderung tidak mampu bertindak secara aktif di

panggung internasional karena energi militer dan politiknya terserap untuk menyelesaikan permasalahan internal (Coplin 2003,131).

Amerika Serikat, meskipun menghadapi beberapa tantangan domestik seperti polarisasi politik dan tekanan ekonomi pasca-pandemi, tetap menunjukkan tingkat stabilitas institusional yang tinggi selama periode 2022–2024. Stabilitas ini memungkinkan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk merespons agresi militer Rusia ke Ukraina secara proaktif melalui jalur diplomatik dan militer.

Data dari Associated Press (2025) mencatat bahwa meskipun angkatan bersenjata AS menghadapi tantangan dalam rekrutmen termasuk kekurangan sekitar 10.000 tentara pada tahun 2023 pemerintah merespons dengan kebijakan kompensasi dan insentif yang agresif. Lebih dari \$6 miliar telah dialokasikan selama tiga tahun terakhir untuk mendukung retensi dan pelatihan personel. Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesiapan militer tanpa menimbulkan ketegangan domestik yang serius (AP News 2025).

Dukungan publik juga relatif stabil terhadap kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina. Menurut Pew Research Center (2022), mayoritas warga Amerika mendukung kerja sama internasional dan bantuan militer terhadap Ukraina, mencerminkan konsensus publik yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis tanpa menghadapi resistensi besar dari dalam negeri (Pew Research Center 2022).

Dengan latar belakang tersebut, stabilitas politik dan sosial di Amerika Serikat selama periode 2022–2024 memungkinkan negara ini untuk memfokuskan sebagian kapasitas militernya dalam peran internasional. Kestabilan ini membedakan AS dari negara-negara lain yang memiliki angkatan militer besar

tetapi harus menggunakannya untuk menangani konflik internal. Dengan kata lain, kondisi domestik yang relatif stabil berperan penting dalam menjadikan Amerika Serikat sebagai aktor aktif dalam merespons dan memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan Eropa Timur, khususnya dalam mendukung kedaulatan dan pertahanan Ukraina.

Dalam kerangka teori William D. Coplin, kekuatan ekonomi merupakan salah satu determinan utama dalam kebijakan luar negeri suatu negara, yang mencakup kemampuan produksi domestik dan posisi negara dalam sistem ekonomi internasional. Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, Amerika Serikat memanfaatkan keunggulan ekonominya tidak hanya sebagai fondasi domestik, melainkan sebagai instrumen diplomasi dan tekanan strategis.

Pertama, kapasitas industri pertahanan Amerika Serikat memungkinkan negara ini memberikan dukungan militer yang berkelanjutan kepada Ukraina. Sejak 2022, AS telah mengirimkan sistem persenjataan mutakhir seperti HIMARS, Javelin, sistem pertahanan udara Patriot, serta drone taktis, sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pertahanan Ukraina. Ini dimungkinkan oleh tingginya kemampuan produksi sektor pertahanan AS, yang didukung oleh kontrak Departemen Pertahanan kepada perusahaan-perusahaan besar seperti Lockheed Martin dan Raytheon (Rimanelli, 2024). Anggaran militer yang dialokasikan secara khusus untuk Ukraina juga menunjukkan peran signifikan kongres dalam mengesahkan dana tambahan di luar anggaran rutin Pentagon, yaitu mencapai lebih dari \$113 miliar dari 2022 hingga awal 2024 (Congressional Research Service, 2023).

Kedua, pengaruh ekonomi global AS, yang antara lain melalui dominasi dolar dalam sistem keuangan internasional, digunakan untuk menekan ekonomi Rusia. Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina, AS bersama negara-negara G7 dan Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi yang sangat luas, termasuk pembekuan aset bank sentral Rusia, pelarangan transaksi dengan bank-bank besar Rusia, dan pemutusan dari sistem SWIFT. Strategi ini dikenal sebagai *weaponization of finance*, yaitu penggunaan sistem keuangan global sebagai alat kebijakan luar negeri (Center for Strategic and International Studies, 2023). AS juga membekukan aset individu oligarki Rusia, menyita properti, dan memblokir akses pendanaan yang dinilai mendukung agresi Rusia.

Ketiga, dukungan fiskal domestik juga mencerminkan kekuatan ekonomi internal AS. Berdasarkan laporan dari Department of Defense (2024), bantuan militer dan kemanusiaan ke Ukraina bukan hanya berupa peralatan, tetapi juga mencakup pelatihan militer, bantuan logistik, dan rekonstruksi infrastruktur sipil. Program-program ini didanai dengan mekanisme khusus seperti Presidential Drawdown Authority (PDA) dan Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), yang mengalokasikan bantuan langsung dari stok militer AS maupun kontrak jangka panjang.

Melalui dimensi ekonomi ini, terlihat bahwa AS tidak hanya menjalankan kebijakan luar negeri secara reaktif, tetapi memosisikan kekuatannya sebagai bagian integral dari respons strategis terhadap ancaman global. Sejalan dengan pandangan Coplin, ekonomi tidak hanya menjadi fondasi domestik, tetapi juga menjadi alat untuk memengaruhi sistem internasional dan menjaga posisi hegemonik AS dalam tatanan global.

Dalam teori William D. Coplin, kekuatan militer merupakan salah satu determinan struktural yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri. Bukan sekadar ukuran kuantitatif seperti jumlah personel atau anggaran militer, tetapi lebih pada bagaimana suatu negara memproyeksikan kekuatan untuk menghalangi lawan (*deterrence*) dan memperkuat posisi tawarnya secara diplomatik. Dalam kasus konflik Rusia–Ukraina, pendekatan militer Amerika Serikat terbukti menjadi instrumen krusial, baik dalam bentuk langsung maupun simbolik.

Pertama, Amerika Serikat memanfaatkan aliansi NATO sebagai sarana proyeksi kekuatan militer. Sejak 2022, AS telah meningkatkan kehadiran pasukan secara signifikan di Eropa Timur, khususnya di Polandia, Rumania, dan negara Baltik. Langkah ini menunjukkan kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan secara global dan mengintegrasikan kekuatan militer dalam kerangka pertahanan kolektif (NATO 2023). Melalui latihan militer gabungan dan penempatan pasukan rotasional, AS menyampaikan sinyal jelas kepada Rusia bahwa NATO siap untuk mempertahankan wilayah anggotanya (Meriläinen, 2025). Penempatan ini tidak semata-mata bersifat defensif, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah (*deterrent*) terhadap perluasan agresi militer Rusia ke luar Ukraina.

Kedua, strategi transfer teknologi militer dan pelatihan intensif terhadap tentara Ukraina memperlihatkan bentuk *proxy empowerment* yang efektif. Amerika Serikat bukan hanya mengirimkan peralatan berat seperti HIMARS, Abrams, NASAMS, dan sistem Patriot, tetapi juga memberikan pelatihan terpadu kepada lebih dari 117.000 tentara Ukraina melalui inisiatif Joint Multinational Training Group–Ukraine (JMTG-U) yang berbasis di Jerman (U.S. GAO, 2024; Meriläinen,

2025). Pendekatan ini bertujuan menciptakan kemampuan tempur mandiri yang setara dengan standar NATO.

Ketiga, strategi deterrence nuklir turut diperhitungkan dalam konteks ini. Walaupun AS tidak terlibat langsung dalam pertempuran, keberadaan sistem senjata strategis, termasuk komando nuklir dan kekuatan serangan jarak jauh seperti F-16 dan JSOW glide bombs, menjadi sinyal kuat kepada Rusia agar tidak melampaui ambang tertentu. Menurut laporan Hudson Institute (2024), ancaman “escalation dominance” dari Rusia direspons dengan keseimbangan strategis oleh AS tanpa memicu konfrontasi langsung.

Seluruh pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS berbasis militer bukan hanya tentang “perang fisik”, tetapi tentang pengendalian ruang dan persepsi dalam sistem internasional. Sejalan dengan konsep deterrence Coplin, Amerika berusaha menghindari keterlibatan langsung, namun tetap mempertahankan kontrol atas arah konflik melalui kekuatan simbolik dan aktual.

Dalam konteks teori Coplin, kapabilitas militer bukan hanya ukuran teknis seperti jumlah senjata atau personel, melainkan kemampuan strategis untuk memproyeksikan kekuatan, memperkuat diplomasi, dan melakukan deterensi terhadap agresi eksternal. Selama periode 2022–2024, Amerika Serikat tidak hanya menjadi negara penyokong terbesar bagi Ukraina, tetapi juga menunjukkan kapasitas proyeksi militernya secara langsung di wilayah Eropa Timur melalui kerja sama NATO dan kehadiran pasukan di pangkalan-pangkalan strategis.

Sejak awal invasi Rusia, AS memperluas kehadiran militernya di beberapa negara sekitar Ukraina, termasuk Polandia, Rumania, Slovakia, Hongaria, dan negara-negara Baltik. Pentagon mengerahkan lebih dari 20.000 tentara tambahan

ke Eropa, meningkatkan jumlah total personel AS di kawasan menjadi lebih dari 100.000 pasukan pada puncaknya (Deni & Aronsson, 2024). Pangkalan militer utama AS seperti Powidz dan Żagań di Polandia, serta pangkalan Mihail Kogălniceanu di Rumania, dijadikan pusat logistik dan latihan gabungan NATO untuk menyalurkan bantuan dan melakukan koordinasi militer.

Bentuk bantuan militer yang diberikan oleh AS mencakup senjata pertahanan dan ofensif, sistem anti-pesawat dan rudal jarak jauh, amunisi artileri, kendaraan tempur lapis baja, serta pelatihan militer dan dukungan intelijen. Paket bantuan besar seperti Presidential Drawdown Authority (PDA) memungkinkan pengiriman langsung dari stok senjata AS, sedangkan program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) digunakan untuk pengadaan senjata baru dari industri pertahanan (Congressional Research Service, 2023). Sejak 2022 hingga pertengahan 2024, total bantuan militer AS ke Ukraina telah mencapai lebih dari \$46 miliar hanya dalam bentuk senjata dan pelatihan (GAO, 2024).

Terkait kerja sama dengan NATO, Amerika Serikat memimpin Enhanced Forward Presence (EFP) di Eropa Timur, memperkuat kehadiran multinasional dan mempercepat Joint Military Exercises seperti Defender Europe dan Saber Strike, yang bertujuan melatih kesiapan dan interoperabilitas pasukan dalam menghadapi skenario konflik nyata. Selain itu, AS juga menjadi aktor utama dalam penguatan NATO Response Force (NRF) dan peluncuran konsep NATO's New Force Model (NNFM) untuk memastikan respons cepat terhadap ancaman Rusia.

Namun yang menarik, AS tidak mengerahkan pasukannya langsung ke wilayah Ukraina. Sikap ini menunjukkan strategi deterrence terbatas: memberi dukungan maksimal kepada Ukraina tanpa memicu eskalasi langsung dengan

Rusia. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan militer AS lebih digunakan sebagai alat proyeksi dan perlindungan sekutu regional, bukan sebagai kekuatan tempur aktif di medan perang Ukraina, suatu pendekatan *balanced deterrence* yang mencerminkan kalkulasi strategis tinggi dalam kebijakan luar negeri AS.

Sehingga bisa dikatakan bahwa dari segi kapabilitas militer dan kerja sama internasional, Amerika Serikat telah membuktikan dirinya tidak hanya sebagai penyumbang dana, tetapi sebagai pemimpin strategis dalam tatanan keamanan regional. Kehadiran pangkalan militer, peningkatan logistik dan personel, serta aliansi yang kuat dengan NATO adalah bentuk konkret dari kemampuan proyeksi kekuatan yang dimaksud Coplin dalam menjelaskan determinan kebijakan luar negeri negara adidaya.

### **3.2 Konteks Internasional**

Menurut Coplin, konteks internasional merupakan hasil dari tindakan politik luar negeri seluruh negara di masa lampau, sekarang, dan masa depan yang diantisipasi oleh para pengambil keputusan. Konteks ini juga mencakup pengaruh hubungan ekonomi dan politik terhadap pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Coplin menekankan bahwa konteks internasional memiliki peran penting dalam menjelaskan politik luar negeri, tetapi tidak dapat menjadi indikator utama untuk menjelaskan sebab-akibat kebijakan suatu negara (Coplin 2003, 165).

Ada elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis.

### 3.1.1 Aspek Geografis

Menurut Coplin, geografi masih memegang peranan penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara, meskipun tidak lagi dianggap sebagai faktor dominan seperti dalam pandangan klasik para ahli geopolitik (Coplin 2003, 167).

Yang dimaksud aspek geografis di sini adalah lokasi fisik suatu negara dalam kaitannya dengan negara-negara lain di dunia. Letak geografis bisa mempengaruhi:

- a. Kedekatan atau proximity antara negara (misalnya negara-negara yang bertetangga cenderung memiliki hubungan lebih erat dalam perdagangan, kebijakan luar negeri, hingga keanggotaan dalam organisasi internasional).
- b. Kepentingan strategis atas wilayah tertentu, seperti jalur pelayaran (Terusan Suez, Panama, Gibraltar), yang tetap relevan meskipun teknologinya sudah berkembang.
- c. Perhitungan logistik, seperti seberapa mudah negara dapat mengirim pasukan atau logistik ke negara lain, walaupun teknologi modern telah mengubah beberapa pertimbangan klasik tersebut.

Intinya, aspek geografis menciptakan peluang dan batasan fisik bagi suatu negara dalam membentuk interaksi dan strategi politik luar negeri.

Dalam kajian *Trade Corridor Wars* oleh Colibasanu (2024), dipaparkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina secara langsung mempengaruhi jalur logistik dan koridor perdagangan utama Eropa, terutama yang menghubungkan Laut Hitam dengan Eropa Barat. Ukraina secara geografis terletak di jantung Eropa Timur dan menjadi titik krusial dalam jaringan energi dan logistik global, termasuk distribusi

gas alam dan gandum. Hal ini menjadikan konflik di wilayah tersebut tidak hanya isu regional, melainkan tantangan terhadap arsitektur perdagangan dan logistik internasional. Bagi Amerika Serikat, posisi geografis Ukraina yang berbatasan langsung dengan anggota NATO (seperti Polandia, Rumania, dan Hungaria) memperkuat urgensi strategis untuk mencegah perluasan pengaruh Rusia lebih jauh ke Eropa Tengah (Coplin 2003, 167).

Geografis Ukraina juga memainkan peran penting dalam kalkulasi militer AS. Letaknya yang dekat dengan Laut Hitam menjadikan wilayah ini strategis dalam hal akses laut dan jalur pelayaran internasional. Selain itu, kemampuan logistik AS untuk mengirimkan bantuan militer dan senjata ke Ukraina melalui negara-negara NATO yang berbatasan langsung memungkinkan AS merancang strategi distribusi dan pengiriman yang lebih efisien. Ini sesuai dengan penekanan Coplin bahwa pertimbangan logistik, termasuk kedekatan dan aksesibilitas fisik, tetap relevan meski teknologi modern telah mengubah sifat peperangan (Coplin 2003, 167).

Lebih lanjut, letak geografis Ukraina menjadikannya perantara antara Rusia dan Uni Eropa, baik secara ekonomi maupun strategis. Dengan menguasai Ukraina, Rusia akan memiliki akses langsung dan dominan terhadap jalur darat dan energi ke Eropa Barat. Oleh sebab itu, AS memandang bahwa mempertahankan kemerdekaan geografis Ukraina berarti mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan Eurasia (Coplin 2003, 168).

Keputusan Amerika Serikat untuk secara aktif mendukung Ukraina dan memperkuat kehadirannya di Eropa Timur bukan hanya didorong oleh solidaritas demokratis atau kepentingan ideologis, tetapi juga oleh pertimbangan geopolitik

geografis yang nyata. Letak Ukraina, kepentingan strategis atas jalur pelayaran dan daratan Eropa Timur, serta keterkaitan logistik antar negara anggota NATO menjadikan aspek geografis sebagai faktor krusial dalam kebijakan luar negeri AS selama periode konflik tersebut.

Dalam kerangka teori William D. Coplin, sistem internasional merupakan determinan objektif yang mengarahkan perilaku negara dalam politik luar negeri. Namun dalam praktiknya, dinamika ini tidak semata bersifat struktural, melainkan juga psikopolitik, yakni bagaimana persepsi kekuatan, ancaman, dan kredibilitas memengaruhi kalkulasi strategi suatu negara. Dalam kasus respons Amerika Serikat terhadap invasi Rusia ke Ukraina, pendekatan tersebut tampak nyata dalam logika deterrence dan upaya untuk mengirimkan sinyal tegas kepada Rusia dan dunia internasional mengenai batas toleransi terhadap agresi.

Secara psikologis dan simbolik, dukungan besar-besaran AS terhadap Ukraina bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan bentuk strategic signaling terhadap Rusia bahwa pelanggaran norma internasional akan dibalas dengan konsolidasi kekuatan Barat. Menurut analisis RAND Corporation, kebijakan bantuan militer AS dirancang tidak hanya untuk memperkuat pertahanan Ukraina, tetapi juga untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa tindakan ofensif semacam itu akan membawa biaya strategis dan ekonomi yang sangat tinggi (RAND, 2024). Ini merupakan implementasi dari deterrence by punishment, di mana negara agresor dicegah melalui ancaman hukuman berat, bukan sekadar penolakan akses.

AS juga mengadopsi deterrence by denial, yakni dengan memastikan Ukraina mampu bertahan secara militer melalui pengiriman sistem senjata presisi tinggi seperti HIMARS, Patriot, dan drone taktis. Dengan membatasi kemungkinan

keberhasilan militer Rusia di Ukraina, AS secara tidak langsung menggagalkan tujuan politik Moskow, sehingga memberikan efek jera untuk rencana agresi berikutnya.

Secara psikopolitik, AS juga berupaya mempertahankan kredibilitas globalnya sebagai pemimpin demokrasi dan kekuatan adidaya. Jika invasi Rusia tidak direspons tegas, hal ini dapat merusak persepsi global tentang keseriusan komitmen keamanan AS di wilayah lain seperti Indo-Pasifik, khususnya terhadap potensi konflik di Taiwan. Oleh sebab itu, dalam perhitungan strategis Washington, dukungan terhadap Ukraina bukan semata konflik regional, tetapi juga merupakan stress test terhadap persepsi musuh potensial, termasuk Tiongkok (Vuving, 2025). Ketegasan AS dalam isu Ukraina adalah bagian dari gertakan strategis terhadap kedua kekuatan revisionis utama, Rusia dan Tiongkok.

Dampak psikopolitik dari kebijakan ini juga terasa dalam ranah diplomatik. Amerika memanfaatkan platform seperti G7 dan NATO untuk memperkuat narasi bahwa Rusia adalah ancaman eksistensial terhadap tatanan dunia berbasis hukum internasional. Menurut Baciu dan Ostermann (2024), konsensus internasional yang dibentuk melalui tekanan psikologis kolektif ini adalah bagian dari upaya menciptakan isolasi moral terhadap Rusia di panggung global.

Dengan demikian, kebijakan AS terhadap Ukraina tidak dapat dilepaskan dari upaya menggertak strategis (*strategic bluffing*) dan menciptakan efek psikologis jangka panjang terhadap musuh. Dalam konteks Coplin, ini menunjukkan bahwa sistem internasional bukan hanya arena struktural, tetapi juga arena persepsi, dan dalam hal ini, persepsi tentang kekuatan, niat, dan batas

kesabaran AS memainkan peran krusial dalam membentuk arsitektur keamanan internasional.

### *3.2.2 Aspek Ekonomi*

Menurut William D.Coplin adalah bagian penting dalam konteks internasional, baik berupa adanya arus barang dan jasa maupun arus modal dengan membuat negara-negara tertentu bergantung dengan negara lain, mencakup hubungan ekonomi antarnegara, baik berupa arus barang dan jasa, maupun arus modal dan bantuan (Coplin 2003,167)

William D.Coplin menekankan bahwa:

- a. Negara berkembang seringkali bergantung pada negara maju dalam hal perdagangan, investasi, dan bantuan internasional.
- b. Sebaliknya, negara maju juga mengalami tekanan ekonomi dari negara lain, misalnya dalam hal permintaan pasar, stabilitas energi, atau kerja sama industri.
- c. Ketergantungan ini membuat keputusan luar negeri tidak bisa dilepaskan dari konteks ekonomi global. Negara yang sangat bergantung pada ekspor atau impor dari negara tertentu, misalnya, akan mempertimbangkan hubungan dagangnya sebelum mengambil sikap politik.

Jadi, aspek ekonomis mencerminkan tingkat ketergantungan dan kerja sama antarnegara yang sangat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap agresi militer Rusia ke Ukraina pada periode 2022 hingga 2024 sangat dipengaruhi oleh dinamika sistem internasional dan aspek ekonomis global, sebagaimana dijelaskan oleh teori

hubungan internasional yang menekankan pentingnya struktur sistem internasional dalam membentuk perilaku negara. Dalam hal ini, pendekatan Coplin relevan, karena menyoroti bahwa negara tidak dapat mengambil keputusan luar negeri tanpa mempertimbangkan konteks hubungan antarnegara dan ketergantungan ekonomi yang menyertainya (Coplin 2003, 172).

Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Amerika Serikat melihat tindakan tersebut bukan hanya sebagai ancaman terhadap kedaulatan Ukraina, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip dasar tatanan internasional berbasis aturan. Sebagai negara adidaya yang memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas global, AS mengambil langkah-langkah responsif yang mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan global. Hal ini diperkuat oleh analisis Menon dan Rumer yang menyatakan bahwa tindakan Rusia menciptakan ketidakpastian dalam sistem internasional dan mendorong respons keras dari negara-negara Barat untuk mempertahankan status *quo* global (Menon & Rumer 2022).

Namun, kebijakan luar negeri AS tidak didorong semata-mata oleh pertimbangan strategis atau ideologis. Faktor ekonomis memainkan peran penting dalam membentuk respons kebijakan ini. Borshchevsky mencatat bahwa AS memanfaatkan instrumen ekonomi, seperti sanksi terhadap sektor energi dan keuangan Rusia, sebagai alat tekanan utama. Sanksi ini ditujukan untuk melemahkan kapasitas Rusia membiayai perang, sekaligus menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi dapat menjadi senjata diplomatik. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri AS mencerminkan kesadaran akan saling ketergantungan

dalam perdagangan dan aliran modal internasional sebagaimana dijelaskan Coplin (Borshchevsky 2022).

Krisis energi yang dipicu oleh perang juga menjadi pertimbangan utama AS. Miller menunjukkan bahwa AS harus mengelola dampak dari lonjakan harga minyak dan gas di pasar global, termasuk krisis energi di Eropa. Sebagai tanggapan, AS memperkuat kerja sama energi dengan negara-negara produsen seperti Qatar dan Arab Saudi, serta meningkatkan ekspor gas alam cair ke Eropa. Ini mencerminkan peran strategis ekonomi energi dalam perumusan kebijakan luar negeri AS: mempertimbangkan tidak hanya stabilitas global, tetapi juga kepentingan pasar domestik (Miller 2023).

Tidak hanya aspek ekonomi global, politik domestik juga turut membentuk sikap AS terhadap Ukraina. Feaver (2022) menjelaskan bahwa tekanan dari masyarakat, industri militer, serta tuntutan ideologis untuk mendukung demokrasi menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi kebijakan. Kongres AS pun memberikan persetujuan untuk bantuan militer dan kemanusiaan yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar, sebagaimana dilaporkan oleh *Congressional Research Service*. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi seperti AS, kebijakan luar negeri adalah hasil dari interaksi antara tekanan internasional dan dinamika internal (Congressional Research Service 2023).

Selain itu, laporan dari Bank Dunia menyoroti bahwa AS juga memperhitungkan efek domino dari invasi Rusia, seperti gangguan pasokan gandum dan energi, serta ancaman inflasi global. AS memandang bahwa kestabilan ekonomi dunia merupakan bagian integral dari keamanan nasionalnya, sehingga

kebijakan luar negeri tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga kelancaran arus barang, jasa, dan keuangan global (Bank Dunia 2023).

Coplin menekankan bahwa negara-negara, baik maju maupun berkembang, saling bergantung satu sama lain secara ekonomi, dan bahwa kebijakan luar negeri seringkali lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan atau memanfaatkan posisi ekonomi strategis tersebut. Dalam konteks Amerika Serikat, faktor-faktor ekonomi domestik memiliki peran penting dalam mendorong dan membenarkan keputusan pemerintah untuk memberikan bantuan besar-besaran kepada Ukraina selama 2022–2024. Tidak hanya sebagai reaksi geopolitik, kalkulasi ekonomi internal juga menjadi alasan kuat di balik keterlibatan aktif AS.

#### 1. Kepentingan Industri Pertahanan dan Kapasitas Produksi Senjata

AS adalah produsen senjata terbesar di dunia. Konflik Ukraina membuka peluang untuk meningkatkan produksi dan ekspor persenjataan, khususnya dari perusahaan-perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Northrop Grumman. Data dari U.S. Department of Defense menunjukkan bahwa banyak paket bantuan ke Ukraina dikeluarkan melalui mekanisme Presidential Drawdown Authority (PDA), yang memungkinkan penggunaan stok senjata lama dan kemudian dipesan kembali dari industri pertahanan domestik (GAO, 2024). Dengan demikian, setiap bantuan militer justru merangsang siklus produksi baru yang menguntungkan ekonomi industri militer dalam negeri. Ini menjadi salah satu argumen ekonomi yang memperkuat komitmen AS terhadap Ukraina.

#### 2. Stabilitas Energi Global dan Kepentingan Pasar Gas Alam AS

Perang di Ukraina menciptakan krisis energi besar di Eropa akibat berkurangnya pasokan gas dari Rusia. Amerika Serikat melihat peluang ekonomi

strategis dengan meningkatkan ekspor gas alam cair (LNG) ke Eropa. Pada 2022 dan 2023, ekspor LNG AS ke Eropa meningkat drastis, menjadikan AS pemasok utama menggantikan Rusia. Ini memperluas pengaruh ekonomi AS di sektor energi, sekaligus memperkuat kerja sama transatlantik. Keputusan untuk membantu Ukraina sekaligus memfasilitasi restrukturisasi pasar energi global, yang secara tidak langsung memperbesar peran AS sebagai penyangga keamanan energi Eropa (Miller, 2023).

### 3. Perlindungan Pasar Global dari Gangguan Ekonomi Perang

AS memiliki kepentingan dalam menjaga kelancaran rantai pasok global, terutama terkait komoditas seperti gandum, pupuk, dan logistik maritim. Invasi Rusia terhadap Ukraina, sebagai salah satu lumbung pangan dunia, mengancam stabilitas harga pangan global dan berdampak pada inflasi. Sebagai akibatnya, pemerintah AS menilai bahwa membantu Ukraina mempertahankan infrastruktur produksinya juga merupakan langkah protektif terhadap guncangan ekonomi dunia yang dapat berdampak balik pada pasar domestik AS (Bank Dunia, 2023). Stabilitas Ukraina menjadi bagian dari kepentingan ekonomi makro AS.

### 4. Pengaruh Dolar AS dan Sistem Keuangan Internasional

Salah satu strategi penting AS adalah menjatuhkan sanksi ekonomi dan finansial terhadap Rusia, termasuk pembekuan cadangan devisa Rusia dan pemblokiran akses ke sistem SWIFT. Langkah ini menunjukkan bahwa AS masih mendominasi sistem keuangan global. Dominasi dolar sebagai mata uang cadangan internasional dipertahankan dengan memastikan bahwa negara-negara yang bertindak agresif akan “dihukum” secara ekonomi. Maka, bantuan ke Ukraina sekaligus menjadi sinyal bahwa AS akan melindungi sistem keuangan global yang

ia kendalikan. Ini menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan luar negeri dan kepentingan hegemonik dalam sistem keuangan dunia (Borshchevsky, 2022).

#### 5. Alokasi Anggaran dan Respons Fiskal Domestik

Meski banyak kritik datang dari sayap konservatif yang menolak pengeluaran luar negeri di tengah defisit domestik, faktanya, alokasi bantuan ke Ukraina dirancang agar tetap sinkron dengan strategi fiskal nasional. Pendanaan tidak hanya berasal dari anggaran baru, tetapi juga dari realokasi atau otorisasi yang sudah tersedia melalui pengesahan Kongres. Dukungan ini sering kali dibingkai sebagai investasi dalam stabilitas global yang akan menguntungkan AS secara jangka panjang, baik dalam bentuk akses pasar maupun posisi strategis.

Jadi, terlihat bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam merespons agresi Rusia bukanlah respons yang sederhana, melainkan hasil dari kalkulasi kompleks yang mempertimbangkan struktur internasional, ketergantungan ekonomi, serta kebutuhan domestik.

#### *3.2.3 Aspek Politis*

Menurut William D. Coplin adalah hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara. Aliansi-aliansi bisa berdampak besar terhadap anggota-anggotanya, terutama apabila aliansi itu menyangkut pasukan-pasukan yang berada di wilayah asing. Kenyataan bahwa komitmen pasukan besar Amerika Serikat masih berada di Eropa, menimbulkan kondisi-kondisi yang harus disadari dan diperhitungkan oleh semua negara, apabila akan membuat keputusan (Coplin 2003, 167-168).

Hal ini meliputi:

- a. Keanggotaan dalam aliansi militer atau politik seperti NATO, yang bisa sangat mempengaruhi posisi dan pilihan kebijakan negara anggotanya.
- b. Keberadaan pasukan asing di suatu wilayah (seperti pasukan AS di Eropa) yang menjadi faktor yang harus diperhitungkan oleh negara-negara lain.
- c. Upaya negara untuk mendapatkan dukungan politik internasional, misalnya saat mengajukan resolusi di PBB atau saat melakukan tekanan diplomatik melalui boikot ekonomi.

Dengan kata lain, aspek politis mencakup dinamika kekuasaan, dukungan internasional, dan posisi strategis dalam sistem politik global, yang semuanya akan sangat mempengaruhi cara suatu negara membuat keputusan dalam kebijakan luar negerinya.

Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, NATO menjadi arena utama konsolidasi politik negara-negara Barat, dengan Amerika Serikat memimpin upaya memperkuat solidaritas aliansi tersebut. Menurut Jilavyan dan Arsenyan, perang ini mengkatalisasi peningkatan peran NATO sebagai aliansi militer dan politik, di mana keanggotaan NATO memainkan peran strategis dalam memperkuat keamanan kolektif dan menjadi pertimbangan utama AS dalam memberikan respons terhadap tindakan Rusia. AS tidak hanya memperluas pengaruhnya di Eropa Timur, tetapi juga mempercepat proses akses Finlandia dan Swedia ke dalam NATO, sebagai bentuk penegasan posisi politik internasionalnya (Jilavyan & Arsenyan, 2024).

Dalam konteks kekuatan militer di lapangan, keberadaan pasukan Amerika Serikat di negara-negara Eropa Timur (seperti Polandia dan Rumania) menjadi

simbol konkret dari komitmen AS terhadap pertahanan kawasan. Hal ini mencerminkan faktor yang disebut Coplin, yaitu kehadiran militer asing sebagai penentu dinamika kekuasaan yang harus diperhitungkan oleh negara lain. Kehadiran tersebut menjadi faktor penahan bagi ekspansi militer Rusia dan memberikan ruang manuver strategis bagi NATO (Coplin 2003,174).

Lebih jauh, Amerika Serikat juga aktif dalam memanfaatkan lembaga-lembaga internasional untuk menggalang dukungan politik global terhadap Ukraina. Dalam berbagai sidang PBB, AS secara konsisten mendukung resolusi yang mengecam agresi Rusia, serta mendorong sanksi internasional melalui forum G7 dan Dewan Keamanan. Dukungan politik ini tidak hanya bertujuan untuk mengisolasi Rusia secara diplomatik, tetapi juga menunjukkan kemampuan AS membangun konsensus internasional sebuah bentuk kekuasaan lunak (*soft power*) yang mencerminkan aspek politis dalam strategi globalnya (Coplin 2003, 174).

Politik luar negeri AS selama periode ini juga menunjukkan upaya diplomasi ekonomi melalui boikot terhadap sektor strategis Rusia dan mobilisasi negara-negara sekutu untuk menerapkan sanksi bersama. Dengan mengandalkan struktur aliansi global, AS mampu mengkonsolidasikan tekanan kolektif terhadap Rusia, tidak hanya dari sisi militer tetapi juga dari segi legitimasi politik internasional. Hal ini menggambarkan peran dominan yang dimainkan oleh aspek politis dalam membentuk respons Amerika Serikat (Coplin 2003, 167).

Respons AS terhadap invasi Rusia menunjukkan bahwa faktor politis seperti aliansi militer, kehadiran militer asing, dan dukungan internasional berperan besar dalam membentuk kebijakan luar negeri. Aspek ini membuktikan bahwa struktur kekuasaan global dan hubungan antarnegara dalam sistem internasional

adalah landasan utama dalam pengambilan keputusan, sebagaimana diteorikan oleh Coplin (Coplin 2003, 167).

Kebijakan Luar Negeri AS di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden berfokus pada penguatan aliansi transatlantik dan kerjasama internasional dalam menghadapi agresi Rusia. Sejak awal konflik, AS telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat dukungan militer dan ekonomi bagi Ukraina termasuk dalam pengiriman senjata canggih dan bantuan finansial yang mencerminkan pemahaman mengenai stabilitas di Eropa adalah kunci keamanan global (Johnson 2023, 67).

Dalam kerangka teori William D. Coplin, lingkungan strategis internasional merupakan salah satu determinan objektif yang sangat memengaruhi formulasi kebijakan luar negeri. Keputusan strategis Amerika Serikat dalam menghadapi invasi Rusia ke Ukraina tidak semata didasarkan pada dinamika domestik, melainkan juga dipicu oleh tekanan geopolitik global yang menuntut kepemimpinan aktif dan konsistensi dalam mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan.

Pertama, komitmen Amerika Serikat terhadap aliansi transatlantik, khususnya NATO dan Uni Eropa, merupakan fondasi kebijakan luar negeri AS di kawasan Eropa Timur. Invasi Rusia tahun 2022 menimbulkan ketidakpastian keamanan yang mendalam di Eropa, yang membuat AS mempertegas kembali peranannya dalam kolektif pertahanan melalui peningkatan dukungan ke Ukraina dan penguatan posisi NATO di sayap timur. Komitmen ini tidak hanya simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk logistik, kehadiran militer, dan dukungan diplomatik yang sistematis (Kornberger, 2024).

Kedua, persaingan strategis antara AS dan Tiongkok turut menjadi variabel yang memperkuat kalkulasi kebijakan luar negeri Washington terhadap Ukraina. Konflik Ukraina dijadikan barometer internasional mengenai komitmen dan kapasitas Amerika dalam mempertahankan sekutu serta merespons tantangan terhadap tatanan global. Respons yang lemah terhadap agresi Rusia akan memberikan preseden berbahaya di Asia Timur, khususnya terhadap potensi invasi Tiongkok ke Taiwan (Vuving, 2025). Oleh karena itu, kebijakan AS terhadap Ukraina juga berfungsi sebagai strategic signaling terhadap Tiongkok dan sekutu Indo-Pasifik bahwa AS tetap berkomitmen pada keamanan global.

Ketiga, pertarungan dalam mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan (rules-based order) menjadi pilar ideologis sekaligus strategis. Rusia dianggap sebagai aktor revisionis yang berusaha meruntuhkan tatanan pasca-Perang Dunia II yang dibangun oleh institusi seperti PBB, NATO, dan Bretton Woods. AS, bersama negara-negara demokrasi Barat, menempatkan pembelaan terhadap Ukraina bukan hanya dalam kerangka nasionalisme atau perimbangan kekuatan, tetapi sebagai bentuk eksistensial dari peran Amerika sebagai penjaga stabilitas internasional dan hukum internasional (Baciu & Ostermann, 2024).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina dipengaruhi secara signifikan oleh konstelasi strategis global yang kompleks: mulai dari kewajiban moral terhadap sekutu NATO, kompetisi hegemonik dengan Tiongkok, hingga urgensi untuk mempertahankan legitimasi tatanan dunia berbasis aturan. Ketiga aspek ini menegaskan bahwa dalam perspektif Coplin, kebijakan luar negeri AS tidak dapat dilepaskan dari interaksi dinamis antara kekuatan domestik dan tekanan sistemik internasional.



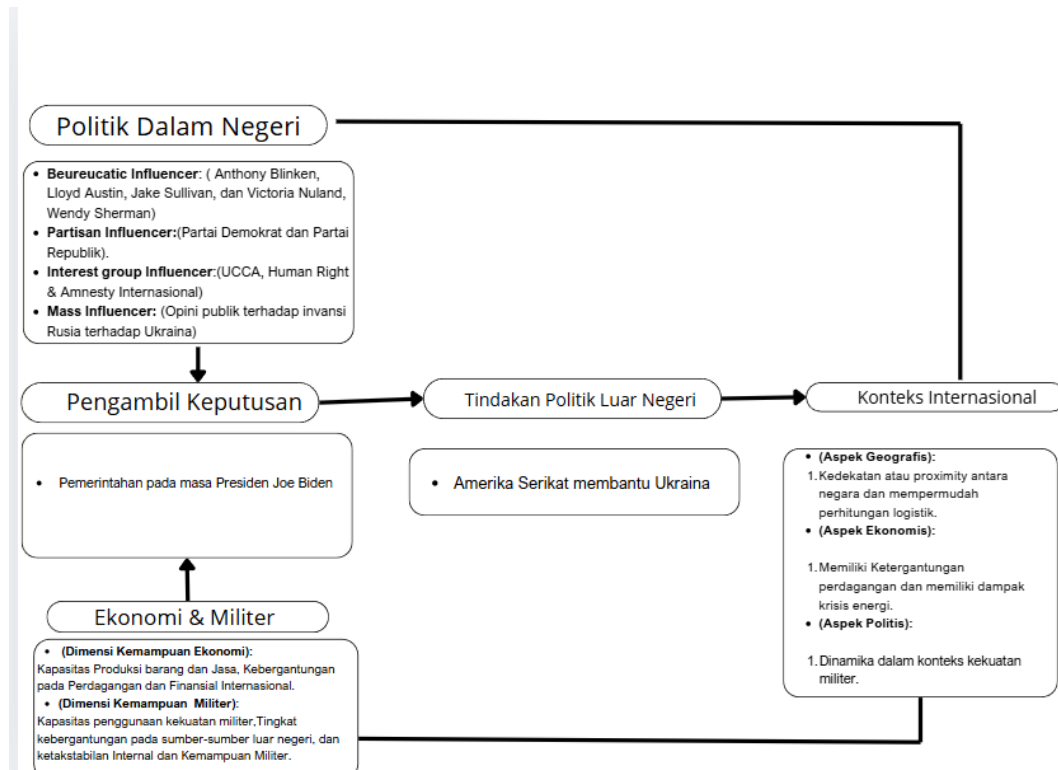
## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam merespons agresi militer Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022–2024 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara empat determinan utama sebagaimana dijelaskan oleh William D. Coplin, yaitu: pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, konteks internasional, serta politik domestik dan aktor-aktor yang mempengaruhinya (*Policy influencers*).

Gambar 4. 1 Hasil Analisis 4 Determinan Politik Luar Negeri



Sumber: Coplin (2003, 30)

**Politik Dalam Negeri;** Kebijakan luar negeri AS juga dipengaruhi oleh berbagai aktor domestik, termasuk *bureaucratic influencers* (seperti: Antony J. Blinken, Lloyd James Austin, Jake Sullivan, dan Victoria Nuland), *partisan influencers* (Partai Demokrat dan Partai Republik), *interest influencers* yaitu Organisasi Non-Pemerintah (NGO) seperti Human Rights Watch dan Ukrainian Congress Committee of America (UCCA), serta *mass influencers* melalui Media Massa Pew Research. Keempat aktor ini memberikan tekanan dan dukungan yang membentuk arah kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina.

Keempat aktor ini memberikan tekanan dan dukungan yang membentuk arah kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina. Dukungan Partai Demokrat terhadap Ukraina didorong oleh keyakinan bahwa agresi Rusia merupakan ancaman terhadap norma-norma internasional, sedangkan Partai Republik menunjukkan skeptisisme terhadap alokasi dana untuk bantuan militer, mengingat defisit anggaran yang dihadapi.

**Pengambil Keputusan;** Presiden Joe Biden sebagai pemimpin eksekutif memainkan peran utama dalam perumusan kebijakan, dengan mempertimbangkan informasi dari lembaga seperti Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional. Keputusan Biden untuk memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina merupakan refleksi dari penilaian strategis terhadap ancaman Rusia dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas internasional serta legitimasi dalam negeri.

Keputusan ini juga menunjukkan kemampuan Biden untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka dari setiap tindakan yang diambil, termasuk pengiriman senjata dan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina.

**Kondisi Ekonomi dan Militer;** Amerika Serikat memiliki kapasitas produksi barang dan jasa serta kekuatan militer yang besar, yang memungkinkan negara ini menyediakan bantuan besar-besaran untuk Ukraina. Selain itu, keterkaitan AS dengan sistem ekonomi global menjadikan konflik Rusia-Ukraina sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi internasional, yang memicu respon aktif dari AS.

Dalam hal ini, sektor manufaktur AS berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan kemampuan untuk memproduksi alat-alat militer serta logistik menjadi aspek vital dalam mendukung kekuatan militer. AS telah mengirimkan lebih dari \$44 miliar dalam bentuk bantuan keamanan kepada Ukraina termasuk sistem pertahanan udara dan amunisi.

**Konteks Internasional;** Sebagai negara adidaya anggota utama NATO, AS merespon agresi Rusia dengan memperkuat aliansi militer dan diplomasi multilateral. Lingkungan internasional, terutama kerjasama dengan Uni Eropa, Kanada, dan negara-negara G7, memperkuat komitmen AS dalam mempertahankan tatanan dunia berbasis aturan (*rules-based order*).

Keputusan untuk memperkuat kehadiran militer di Eropa Timur dan memberikan dukungan kepada Ukraina tidak hanya didorong oleh solidaritas ideologis, tetapi juga oleh pertimbangan geopolitik yang nyata. Letak geografis Ukraina yang strategis menjadikannya perantara antara Rusia dan Uni Eropa, sehingga mempertahankan kemerdekaan Ukraina menjadi penting bagi keseimbangan kekuatan di kawasan Eurasia.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Rusia-Ukraina tahun 2022–2024 tidak dapat dilepaskan dari dinamika internal dan eksternal yang

saling mempengaruhi. Melalui kerangka Coplin, dapat dipahami bahwa keputusan strategis AS adalah hasil dari proses yang melibatkan kondisi ekonomi-militer, intervensi aktor-aktor domestik, serta tuntutan geopolitik internasional. Respons AS yang proaktif dan multilateral mencerminkan upaya untuk mempertahankan stabilitas global, sekaligus menyeimbangkan tuntutan politik domestik dengan kepentingan strategis jangka panjang.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar studi kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke depan memperluas fokus analisis terhadap keterlibatan aktor non-negara secara lebih mendalam, termasuk peran *think tank* global dan tekanan dari industri pertahanan. Selain itu, penelitian serupa sebaiknya memasukkan dimensi perbandingan antar negara agar memberikan perspektif komparatif yang lebih luas terhadap respons internasional dalam konflik global. Untuk pengembangan akademik selanjutnya, disarankan agar penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed-method*) agar dapat mengeksplorasi data kuantitatif dari opini publik dan pengaruhnya terhadap keputusan elite pemerintahan secara lebih empiris.



## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Baciu, Catalin, and Falk Ostermann. 2024. "From Kabul to Kyiv: The Crisis of Liberal Interventionism and the Return of War." *Politics and Governance* 12(1).  
<https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/7348>.
- Borshchevskaya, Anna. 2022. *The Economic Levers in U.S. Foreign Policy Toward Russia*. The Washington Institute for Near East Policy.
- Borshchevsky, Pavlo. 2022. "Economic Weaponry in U.S. Foreign Policy: The Case of Ukraine." *Geoeconomics Review*.
- Bramastya, R., and R. Puspitarini. 2022. "Geopolitik Ukraina terhadap Rusia dan Uni Eropa." *Sospoli Institute Journal* 2(2).  
<https://www.jisip.org/index.php/sij/article/view/8>.
- Ercan, A., and B. S. Gülboy. 2023. "Nuclear Deterrence and A Prospective Assessment of the Russian-Ukrainian War." *Journal of Applied And Theoretical Social Sciences* 5(1). <https://doi.org/10.37241/jatss.2023.81>.
- Feaver, Peter D. 2022. "Public Opinion, Elite Discourse, and Foreign Policy: Lessons from Ukraine." *American Political Science Review*.
- Gheciu, Alexandra, and Stefanie von Hlatky. 2024. "Irreconcilable Differences? NATO's Response to Russian Aggression Against Ukraine." *International Journal* 79(2): 275–296. <https://doi.org/10.1177/00207020241255999>.
- Handayani, Fitria. 2023. "Manajemen Konflik Menuju Madrasah Efektif." *Journal of Student Research* 1(5). <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5.1955>.
- Hendra, Zulkarnain, Imam Musani, and Rony Samiaji. 2021. "Studi Kasus Perang Modern antara Rusia dengan Ukraina Tahun 2014 Ditinjau dari Aspek Strategi dan Hubungan Internasional." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2(2): 730–746. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.632>.
- Jilavyan, S., and M. Arsenyan. 2024. "Evaluating NATO Enlargement: From Cold War Victory to the Russia-Ukraine War." *Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University*.
- Miller, Charles. 2023. "Energy Interdependence and U.S. Foreign Policy." *Foreign Affairs Journal* 101(3).

- Nurwijayati, Putri Puspita, and Yon Machmudi. 2022. "Pragmatisme Kebijakan Luar Negeri Mesir dalam Menyikapi Konflik Rusia-Ukraina." *Jurnal ICMES* 6(2). <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i2.139>.
- Pradhan, Rudra P. 2019. "Investigating the Causal Relationship between Transportation Infrastructure, Financial Penetration and Economic Growth in G-20 Countries." *Research in Transportation Economics* 78: 100766. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2019.100766>.
- Rieger, Elmar. 2024. "A Manchurian Candidate? The GOP's Discourse on the Russian War in Ukraine." *Politische Vierteljahresschrift*.
- Rimanelli, Marco. 2024. "US/NATO/EU/Western Support of Ukraine in Two Russo-Ukrainian Wars (2013–21 & 2022–25)." *Florida Political Chronicle*.
- Sethi, Manpreet. 2022. "Nuclear Overtones in the Russia-Ukraine War." *Arms Control Today* 52(5): 12–15.
- Smith, Charles A. 2022. "Transatlantic Norms and Deterrence: The U.S. Strategic Response to Russian Aggression." *Journal of Strategic Studies* 45(3): 35–58.
- Vuving, Alexander L. 2025. "Bamboo in a Storm: The Russia-Ukraine War and Vietnam's Foreign Policy (2022–2024)." *The Pacific Review*. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4825444](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4825444).

### **Buku**

- Coplin, William D. 2003. *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. Wadsworth.
- Menon, Rajan, and Eugene Rumer. 2022. *The Russia-Ukraine War and the Return of Geopolitics*. Carnegie Endowment for International Peace.

### **Laporan**

- Center for Strategic and International Studies. 2023. *Weaponizing Finance: How the U.S. Uses Sanctions and Economic Leverage*. <https://www.csis.org>.
- Congressional Research Service. 2023. *U.S. Security Assistance to Ukraine*. CRS Reports. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040>.
2024. *U.S. Security Assistance to Ukraine: Legislative and Operational*

Overview.

———. 2024. U.S. Trade Policy: Background and Current Issues.  
<https://www.congress.gov/crs-product/IF10156>.

Defense News. 2024. Top 100 Defense Companies Report.

Department of Defense. 2023. "Fact Sheet on U.S. Military Assistance to Ukraine."  
<https://www.defense.gov>.

———. 2024. "Fact Sheet on U.S. Security Assistance to Ukraine."  
<https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3368435>.

Feaver, Peter D. 2022. The Domestic Politics of U.S. Foreign Policy Toward Ukraine. Brookings Institution.

GAO – U.S. Government Accountability Office. 2024. Ukraine: DOD Could Strengthen International Military Training Coordination by Improving Data Quality. <https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf>.

Government Accountability Office. 2023. F-35 Sustainment: DOD Needs to Cut Sustainment Costs and Improve Readiness.

Hudson Institute. 2024. NATO-Russia Military Balance Memo.  
[https://media.hudson.org.s3.amazonaws.com/062424\\_NATO-Russia\\_Military\\_Balance\\_Memo+\(1\).pdf](https://media.hudson.org.s3.amazonaws.com/062424_NATO-Russia_Military_Balance_Memo+(1).pdf).

Kornberger, Julia I. 2024. The Future of Transatlantic Relations after Ukraine: Unravelling Republican Foreign Policy Objectives. Master's Thesis, Diplomatic Academy of Vienna.  
<https://phaidra.univie.ac.at/detail/o:2074079>.

Meriläinen, Lotta. 2025. I Need Ammunition, Not a Ride: Examining US, German and British Military Support for Ukraine During the Russian Full-Scale Invasion (2022–2024). National Defence University, Department of Warfare. <https://www.doria.fi/handle/10024/192466>.

National Defense Industrial Association. 2022. Vital Signs 2022: The Health and Readiness of the Defense Industrial Base.

National Institute of Standards and Technology. 2023. Annual Report on the U.S. Manufacturing Economy: 2023.  
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ams/NIST.AMS.600-13-upd1.pdf>.

RAND Corporation. 2024. Strategic Implications of U.S. Assistance to Ukraine.

[https://www.rand.org/pubs/research\\_reports/RRA2438-2.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2438-2.html).

U.S. Bureau of Economic Analysis. 2024. Direct Investment by Country and Industry, 2023. <https://www.bea.gov/news/2024/direct-investment-country-and-industry-2023>.

2024. GDP by Industry. <https://www.bea.gov/data/gdp/gdp-industry>.

2024. International Services (Expanded Detail). <https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-services-expanded>.

2024. U.S. International Trade in Goods and Services, December and Annual 2023. <https://www.bea.gov/news/2024/us-international-trade-goods-and-services-december-and-annual-2023>.

U.S. Department of Defense. 2024. Fact Sheet on U.S. Security Assistance to Ukraine.

U.S. Government Accountability Office. 2024. Ukraine: Oversight of Security Assistance and Policy Debate. <https://www.gao.gov>.

World Bank. 2023. Global Economic Prospects: Ukraine Crisis Update. <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>.

### **Artikel Daring**

Biden Administration. 2022. Fact Sheet: United States Response to Russian Aggression. <https://www.whitehouse.gov>.

2022. Sanctions and Export Controls on Russia.

Colibasanu, Antonia. 2024. Trade Corridor Wars. Policy Commons.

Council on Foreign Relations. 2023. Election 2024: Joe Biden Makes the Case for Ukraine Aid. <https://www.cfr.org/blog/election-2024-joe-biden-makes-case-ukraine-aid>.

———. 2024. Here's How Much Aid the United States Has Sent Ukraine. <https://www.cfr.org/article/how-much-us-aid-going-ukraine>.

———. 2024. How Much U.S. Aid Is Going to Ukraine?

Gallup. 2023. Support for Greater U.S. Role in Ukraine Climbs to New High.

Government of Canada. 2025. Canada-Ukraine Relations. <https://www.international.gc.ca/country-pays/ukraine/relations.aspx?lang=eng>.

- Gramlich, John. 2023. "What Public Opinion Surveys Found in the First Year of the War in Ukraine." Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/02/23/what-public-opinion-surveys-found-in-the-first-year-of-the-war-in-ukraine/>.
- Gvosdev, Nikolas K. 2024. Thinking About Deterrence in the 21st Century. Policy Commons.
- Holland, Andrew. 2021. Exploring the Effectiveness of Nuclear Deterrence.
- Human Rights Watch. 2023. World Report 2023: Ukraine. <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/ukraine>.
- Kyiv Independent. 2023. "Canada Supports Ukraine Becoming a NATO Member."
- Landgraf, William, and Alexander Vershbow. 2024. In Conversation with Amb. Vershbow. Policy Commons.
- Najmi, C. S., and R. Lestiyaningsih. 2021. "Upaya Resolusi Konflik dalam Perang Rusia – Ukraina 2022."
- NATO. 2023. Strengthening NATO's Eastern Flank.
- . 2025. Relations with Ukraine. [https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_37750.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm).
- Pew Research Center. 2022. Americans' Views on U.S. Support to Ukraine. <https://www.pewresearch.org>.
- . 2022. Public Expresses Mixed Views of U.S. Response to Russia's Invasion of Ukraine. <https://www.pewresearch.org/politics/2022/03/15/public-expresses-mixed-views-of-u-s-response-to-russias-invasion-of-ukraine/>.
- Purnawarta. 2024. "Dinamika Bantuan Militer AS ke Ukraina dan Perpecahan Kongres." <https://purnawarta.id/berita/konflik-ukraina-bantuan-as>.
- United States Trade Representative. 2022. Economy & Trade. <https://ustr.gov/issue-areas/economy-trade>.
- Ukrainian Congress Committee of America. 2022. Welcome - Vitae Emo. <https://ucca.org/>.
- U.S. Department of State. 2023. Secretary Blinken's Statements on Ukraine. <https://www.state.gov>.
- White House Briefing. 2023. Press Gaggle on Ukraine Assistance Coordination.

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room>.

Wike, Richard, Moira Fagan, Sneha Gubbala, and Shannon Austin. 2022. Growing Partisan Divisions Over NATO and Ukraine.